

**PENGELOLAAN DANA BANTUAN SOSIAL DALAM
MENGATASI KEMISKINAN DI KECAMATAN TANA LILI
KABUPATEN LUWU UTARA**

Skripsi

*Diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo
untuk Melakukan Penelitian Skripsi Dalam Rangka Penyelesaian
Studi Jenjang Sarjana pada Program Studi Hukum Tata Negara*



IAIN PALOPO

Oleh

DARMAWAN

17 0302 0050

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

**PENGELOLAAN DANA BANTUAN SOSIAL DALAM
MENGATASIKEMISKINAN DI KECAMATAN TANA LILI
KABUPATEN LUWU UTARA**

Skripsi

*Diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo
untuk Melakukan Penelitian Skripsi Dalam Rangka Penyelesaian
Studi Jenjang Sarjana pada Program Studi Hukum Tata Negara*



IAIN PALOPO

Oleh DARMAWAN

17 0302 0050

Pembimbing:

Pembimbing I : Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI

Pembimbing II : Fitriani Jamaluddin, SH., MH

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Darmawan
NIM : 17 0302 0050
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 2023

Yang membuat pernyataan,



Darmawan

17 0302 0050

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Pengelolaan dana bantuan sosial dalam mengatasi kemiskinan di kecamatan tana lili kabupaten luwu utara*, yang ditulis oleh Darmawan Nomor Induk Mahasiswa 1703020050, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah *dimunaqasyahkan* pada hari Rabu, 06 September 2023 Maschi, bertepatan dengan 19 Shafar 1445 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 6 September 2023

TIM PENGUJI

- | | | |
|------------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc, M. Ag | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Rahmawati B, M. Ag | Penguji I | (.....) |
| 4. Sabaruddin, S. HI., M. H | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. | Pembimbing II | (.....) |

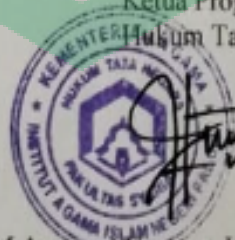
Mengetahui:

Rektor IAIN Palopo
Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP. 19740630 200501 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara



Nurwana Halide, S.HI., M.H.
NIP. 19880106 201903 2 007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan yang Maha Agung yang sedalam-dalamnya atas segala Rahmat, Nikmat, Karunia, dan Hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengelolaan Dana Bantuan Sosial dalam Mengatasi Kemiskinan di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara”** yang disusun bertujuan untuk tugas akhir sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana.

Shalawat dan salam atas junjungan Rasulullah Saw, Keluarga, sahabat dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Nabi yang diutus Allah SWT. Sebagai Nabi Uswatun Khasanah (contoh teladan yang baik) bagi seluruh alam semesta.

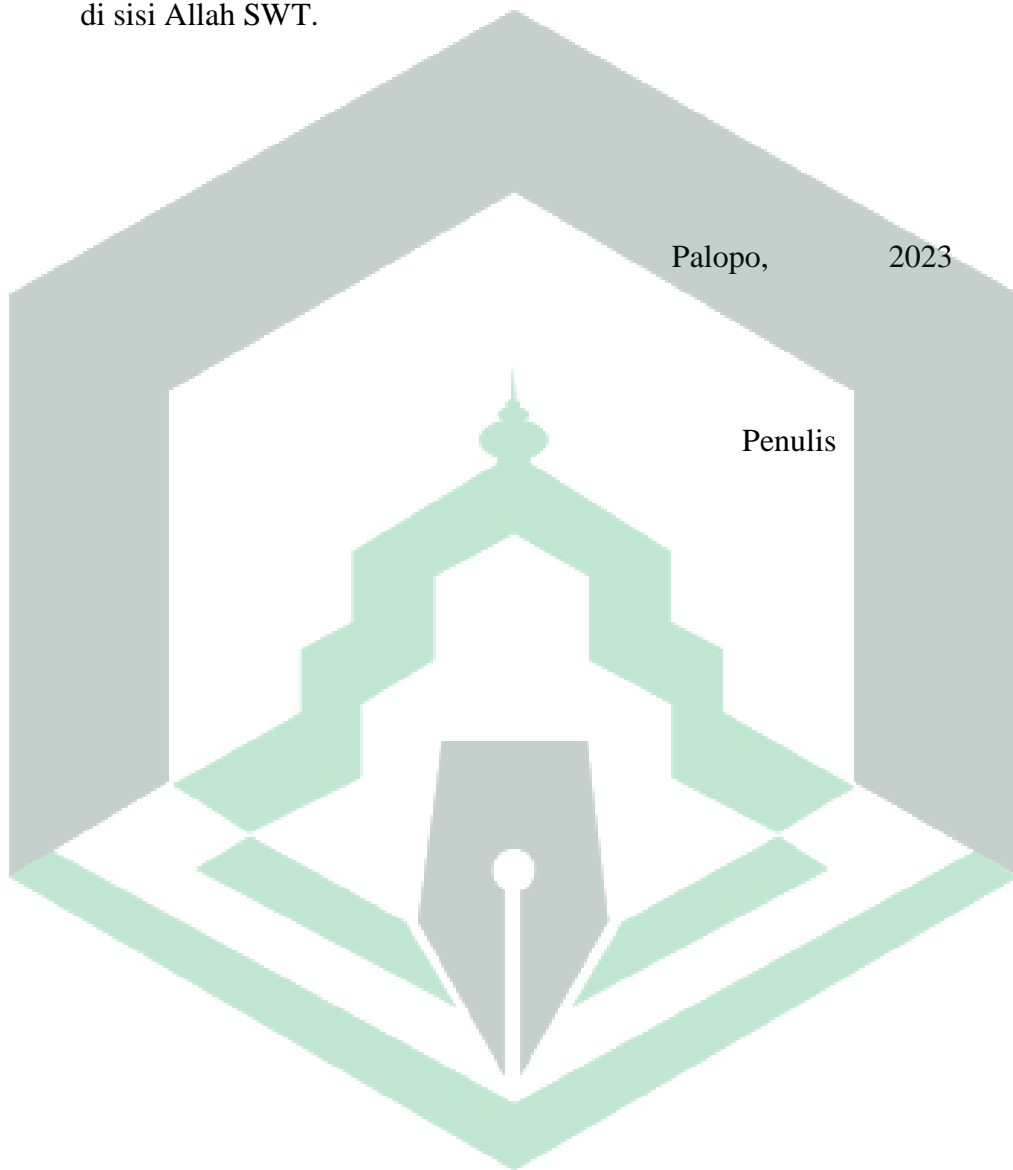
Banyak pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini, untuk itu maka dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Rahman dan Ibunda saya Nur Haeda yang telah melahirkan, membesarkan, dan mendoakan ananda hingga seperti sekarang ini. Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Rektor IAIN Palopo, Bapak Dr. Abbas Langaji, M.Ag dan juga kepada para jajarannya yakni Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Arafat Munir Yusuf, M.Pd, Wakil Rektor Bidang Administrasi

Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Bapak Dr. Masruddin, S.S., M.Hum dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Bapak Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI

2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag dan juga Kepada Wakil Dekan I Bidang Akademik, Bapak Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Bapak Ilham S.Ag., M.A. dan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Bapak Muhammad Darwis S.Ag., M.A..
3. Penguji saya Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. dan Bapak Sabaruddin, S.HI., M.H selaku penguji I dan II yang telah membantu dan membimbing saya dalam penyelesaian skripsi saya
4. Pembimbing saya, Bapak Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI dan Ibu Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H terima kasih banyak telah memberikan masukan dan bimbingan dalam rangka penyelesaian skripsi saya.
5. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Ibu Nirwana Halide, S.HI., M.H begitupun juga dengan Sekertaris Program Studi, Bapak Syamsuddin, S.HI., M.H.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah membagikan ilmunya kepada saya dan teman-teman saya.
7. Para Staf IAIN Palopo, terkhusus kepada Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu demi penyelesaian studi saya.
8. Para penerima Bansos Kecamatan Tana Lili yang telah membantu dan bersedia menjadi narasumber dalam penelitian saya

9. Teman-teman mahasiswa Semoga kita semua senantiasa dalam perlindungan Allah SWT, senantiasa diberi kesehatan, dan aktivitas-aktivitas kita berada dalam kebaikan dan diberi kemudahan dalam melaksanakan serta bernilai ibadah di sisi Allah SWT.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transi literasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Daḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoflog dan vokal rangkap atau diflog.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
	<i>fathah</i>	A	A
	<i>Kasrah</i>	I	I
	<i>dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
	<i>fatūah dan wau</i>	I	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*
 هَوْلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ى /	<i>fathah dan alif atau yā'</i>		a dan garis di atas
ي ...	<i>kasrah dan ya'</i>	ī	i dan garis di atas
و ...	<i>dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*
 رَمَى : *rāmā*
 قِيلَ : *qīla*
 يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yan berakhir dengan ta marbutah diikitu oleh kata yang menggunakan kata sadang al- serta kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransiterasikan dengan ha (h). contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madinah al-fadilah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikma*

5. Yaddah (Tasyadid)

Syaddah atau tasyadid yang dalam istem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasyadid (الله), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan gunda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbana*
نَجَّيْنَا : *najjaina*
الْحَقُّ : *al-haqq*
عُدُّوْ : *mu-ima*

Jika huruf (ي) ber-tasyadid di akhir sebuah kata dan didahulu oleh huruf kasrah maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Ali* (bukan *'Aliyy* atau *A'ly*)
عَرَبِيٌّ : *Arabi* (bukan *A'rabiyy* atau *'Arabiy*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, bail ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi haruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)
الْبِلَادُ : *al-biladuh*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf menjadi apstorof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta muruna*
النَّوْءُ : *al-nau*
شَيْءٌ : *syai’un*
أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulis kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, atau kalimat yang lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis secara menurut cara dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

- *Syarah al-a=Arba’in al-Nawawi*
- *Risalah fi ri’ayah al-masalahah*

9. Lafz al-jalalah

Kata ‘Allah’ yang didahului partikel seperti huruf jaar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudah ilaih (Frasa nomial), ditransliterasi tanpa huruf hamzah

Contoh:
بِاللَّهِ دِيْنُ اللَّهِ *dinullah billah*

Kata ‘Allah’ ta’ marbutah di akhir yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf [f]. Contoh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillah*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam, transliterasinya huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya digunakan menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, dan bulan) dan huruf pertama pada pemulaan kalimat. Bila nama didahului oleh kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CKD, dan DR). Contoh:

- *Wa ma Muhammadun illa rasul*
- *Inna awwala baitin wudi'a Innasi IallACI bi bakkata mubarakan*
- *Syahru Ramadan al-lazi unzila fihI al-Quran*
- *Nasr al-Din al-Tusi*
- *Nasr Hamid Abu Zayd*
- *Al-Tufi*
- *Al-Masalahal fi al-Tasyi' al-islam*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus sebutkan sebagai nama terakhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi :Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan :Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)
Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi :Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan Zaid, Nasr Hamid Abu).

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt	= subhanahu wa ta'ala
Saw	= sallallahu 'alaihi wasallam
as.	= 'alaihi al-salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS.../...: 4	= QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali 'Imran/3:4
HR	= Hadis Riwayat



DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PRAKATA.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR AYAT.....	xv
DAFTAR HADIST.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
ABSTRAK	xix
ABSTRAC	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	10
B. Kajian Teori.....	8
1. Pengelolaan Dana	13
2. Bantuan Sosial	15
3. Kemiskinan.....	23
C. Kerangka Pikir	29
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34
C. Data dan Sumber Data.....	34
D. Teknik Pengumpulan data	35
E. Keabsahan Data.....	36
F. Teknik Analisis Data.....	38
G. Definisi Istilah	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
B. Hasil Penelitian.....	45
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	50
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 Q.S. An-Nisa/4 : 32	25
--	----



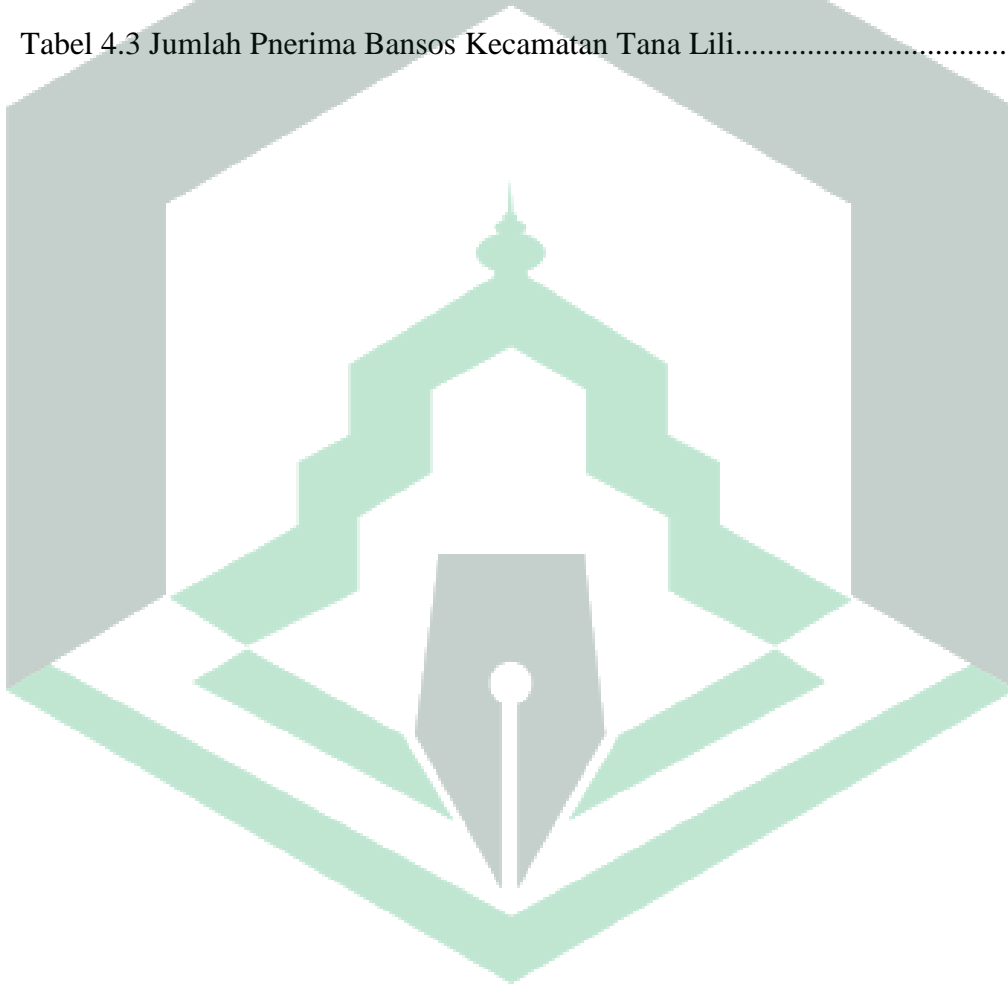
DAFTAR GAMBAR

Kerangka Pikir	33
Struktur Organisasi Kecamatan Tana Lili.....	46



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin Luwu Utara.....	4
Tabel 1.2 Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin Kecamatan Tana Lili.....	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahuku yang Relevan	10
Tabel 4.1 Sarana Pendidikan TK Kecamatan Tana Lili.....	43
Tabel 4.2 Sarana Pendidikan SD Kecamatan Tana Lili.....	44
Tabel 4.3 Jumlah Penerima Bansos Kecamatan Tana Lili.....	44



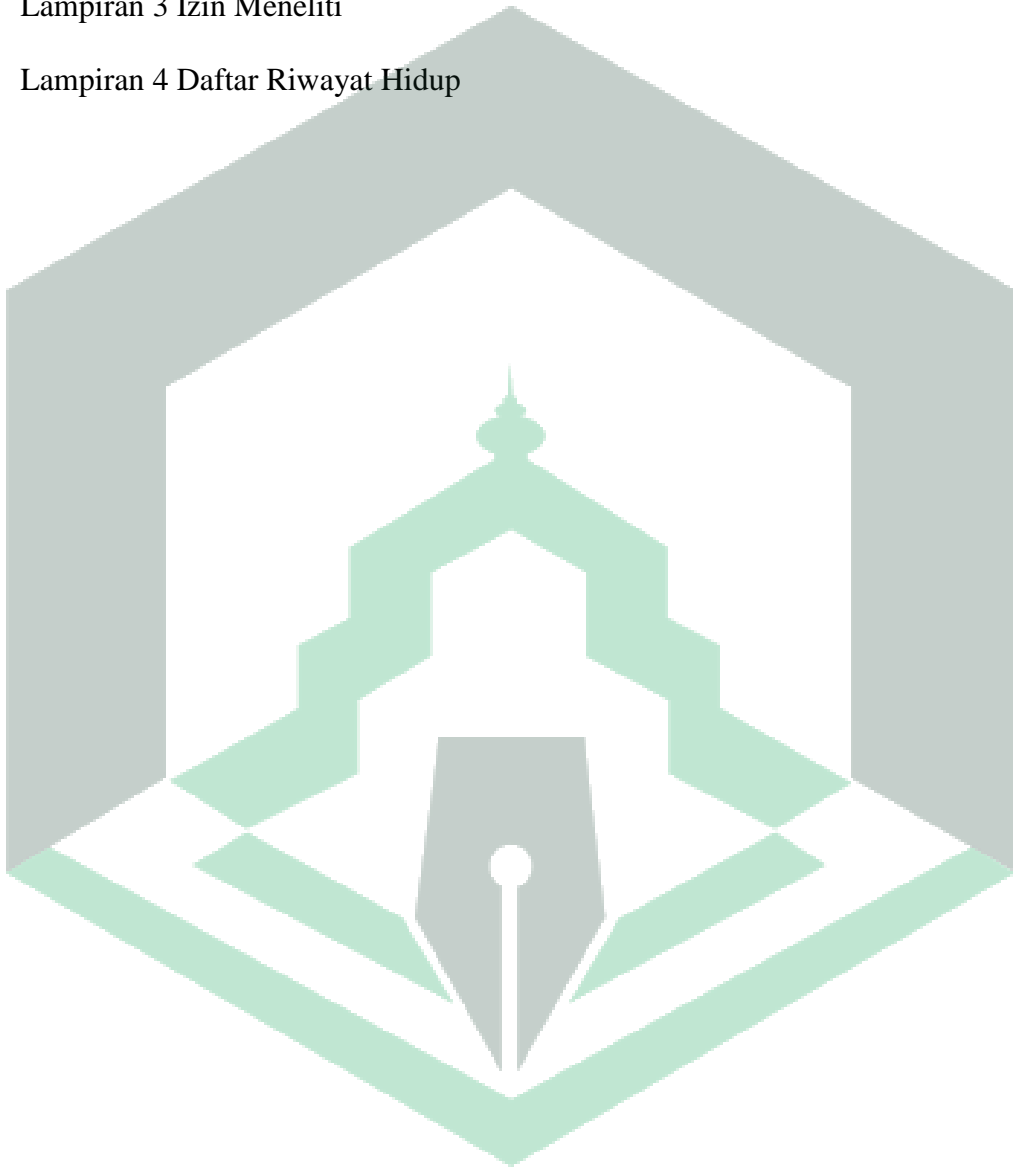
DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi

Lampiran 3 Izin Meneliti

Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup



ABSTRAK

Darmawan 2023, *“Pengelolaan Dana Bantuan Sosial dalam Mengatasi Kemiskinan di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara”* Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo di bimbingan oleh Mustaming dan Fitriani Jamaluddin

Skripsi ini membahas tentang “Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Dalam Mengatasi Kemiskinan di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara” adapun metode pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi Hasil penelitian ini adalah Penyaluran program bansos di Kecamatan Tana Lili sudah berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial mengenai pemenuhan kebutuhan dasar Bantuan Sosial tahap pelaksanaan penyaluran bantuan sosial BST di kelurahan rampoang telah disalurkan dalam beberapa tahapan. Penetapan bagi penerima sudah memenuhi kriteria komponen Bansos. Program Bantuan Sosial Tunai sudah dapat membantu dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan keluarga yang menerima bantuan tersebut. Dimana para penerima bantuan sudah merasa sedikit terbantu dengan adanya bantuan sosial yang mereka terima ini. Adapun dampak yang dirasakan peneriman bantuan Sosial yaitu dapat (1) Terbantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, (2) Meringankan biaya pendidikan, dan (3) Membantu dalam kesehatan, dalam artian mereka merasakan dampak langsungnya dalam mendapatkan bantuan tersebut.

Kata Kunci : Bantuan Sosial, Kecamatan Tana Lili, Pengelolaan Dana

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan amanah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, terutama pasal 33 dan 34, negara bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹Salah satu upaya pemerintah dalam memenuhi kesejahteraan sosial tersebut adalah dengan memberikan bantuan sosial Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.²Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 181 Tahun 2012, Bantuan Sosial (Bansos) merupakan pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh pemerintah pusat/daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.³ Meskipun sering dianggap sebagai alat politik karena berinteraksi langsung dengan masyarakat, bansos yang terintegrasi dengan baik dan tepat sasaran telah terbukti mampu mengentaskan kemiskinan dan mengurangi.

Negara dengan belanja pendidikan dan kesehatan yang lebih pro-kemiskinan (*pro-poor*) cenderung memiliki hasil pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, tata kelola yang baik, tingkat pendapatan per kapita yang lebih tinggi, serta akses terhadap informasi yang lebih luas:

¹ Undang-Undang Dasar 1945

² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

³ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2012

Pemberian bansos tidak serta merta mampu mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan. Menurut penelitian pada sebuah negara berpenghasilan rendah yang sedang dalam masa transisi (*a low-middle income country in transition*), bukti bansos dapat mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan tidaklah cukup. Hal tersebut disebabkan manfaat yang diterima sangatlah kecil dan masyarakat miskin hanya menerima sebagian kecil dari manfaat tersebut, secara desain program bansos tidak bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan, serta skala ekonomi yang sedang dalam masa transisi menyulitkan pemerintah dalam mengidentifikasi masyarakat miskin. Salah satu faktor keberhasilan belanja pemerintah dalam mencapai hasil yang diharapkan adalah dengan tata kelola yang baik. Kemiskinan merupakan suatu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di Negara manapun, salah satunya Negara Indonesia yang memiliki jumlah penduduk yang padat.

Jumlah penduduk yang sangat padat, menyebabkan Indonesia mengalami masalah sosial seperti kemiskinan. Kemiskinan sendiri merupakan masalah yang menyangkut banyak aspek kerana berkaitan dengan pendapatan yang rendah, derajat kesehatan yang rendah, buta huruf, dan ketidaksamaan derajat antar jenis kelamin serta buruknya lingkungan hidup. Kemiskinan merupakan salah satu persoalan yang tidak pernah luput dari perhatian pemerintah suatu Negara dibelahan dunia manapun.

⁴Kemiskinan menjadi persoalan fenomenal dalam bidang ekonomi yang menjadi titik acuan keberhasilan pemerintah Negara dari waktu ke waktu, terlebih pada Negara yang sedang berkembang. Indonesia sebagai salah satu Negara yang masuk

⁴ Irhami, *Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan* 2017

kategori berkembang menyadari bahwa pentingnya memperhatikan masalah kemiskinan dan mengusahakan segala upaya untuk menurunkan tingkat kemiskinan dengan melakukan perencanaan jangka panjang untuk meningkatkan perekonomian.

Hak-hak dasar yang diakui secara umum antara lain meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Komputer kebutuhan dasar menjadi tujuan penting dalam pelaksanaan pembangunan Luwu Utara, Sulawesi Selatan, belum bisa keluar dari persoalan kemiskinan. Penduduk kategori miskin di Kabupaten Luwu Utara mencapai 42.200 orang atau 13,41% persen dari total penduduk Luwu Utara pada tahun 2020. Angka ini hanya turun sedikit dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2019 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Luwu Utara⁵

Tabel 1.1 BPS Jumlah Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskindi Kabupaten Luwu Utara 2019-2021

Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin	2019	2020	2021
Garis kemiskinan (Rupia)	342.277,00	357.669,00	357.669,00
Jumlah penduduk miskin	42.480,00	42.200,00	43.150,00
Prestase penduduk miskin (%)	13,60	13,41	13,59

Sumber : Badan Pusat Statistic Kabupaten Luwu Utara

Dari tabel 1.1 tersebut, data BPS menunjukkan penduduk miskin luwu utara

⁵ Badan Pusat Statistik (BPS) Luwu Utara 2019-2021

pada tahun 2020 sebesar 13,59% atau meningkat 0,18% dibandingkan tahun 2020, namun menurun 0,01% dibandingkan dengan tahun 2019. Secara absolut jumlah penduduk miskin kabupaten Luwu Utara pada tahun 2021 sebesar 43,15 ribu jiwa. Jumlah ini meningkat sebesar 0,95 ribu jiwa atau sebanyak 950 jiwa dibandingkan tahun 2020 dan 0,67 ribu jiwa dibandingkan kondisi pada tahun 2019.

Tabel 1.2 BPS Jumlah Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara 2019-2021

Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin	2019	2020	2021
Miskin			
Garis kemiskinan (Rupia)	22.818,00	23.844,00	23.844,00
Jumlah penduduk miskin	2.832,00	2.813,00	2.876,00
Prestase penduduk miskin (%)	12,41	11,80	12,06

Sumber : Badan Pusat Statistic Kabupaten Luwu Utara

Dari tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa jumlah peduduk miskin di Kecamatan Tana Lili pada tahun 2019 berjumlah 2.832 jiwa dengan presentase penduduk miskin 12,41%, dan pada tahun 2020 terjadi penurunan angka kemiskinan dimana jumlah penduduk miskin di Kecamatan Tana Lili mencapai 2.813 jiwa dengan presentase penduduk miskin 11,80% dan pada tahun 2021 terjadi peningkatan angka kemiskinan yaitu 2.876 jiwa dengan presentase penduduk miskin 12.06%.

Masalah yang paling besar dihadapi setiap masyarakat adalah kemiskinan. Kemiskinan adalah salah satu masalah yang sulit dihadapi oleh para pembuat kebijakan. kemiskinan di Luwu Utara. Kabupaten Luwu Utara, belum bisa keluar dari persoalan kemiskinan ,penduduk kategori miskin di daerah berjumlah

Lamaraginang masih cukup tinggi mencapai 42.200 orang atau 13,41 persen dari total penduduk Luwu utara pada tahun 2020. Angka ini hanya turun sedikit dibandingkan dengan tahun 2019-2018. Dimana data BPS menunjukkan, penduduk miskin Luwu Utara tahun 2019 sebanyak 42,480 jiwa dan pada tahun 2018 Rp 329,967, 2019 Rp 342 277,dan tahun 2020 Rp 357 669. Wakil bupati luwu utara mengatakan, salah satu program utamanya adalah pengetasan kemiskinan. Sedangkan tingkat kemiskinan di Luwu Utara, Menurut data BPS di urutan tiga terbawah se- Sulawesi Selatan. Luwu Utara adalah daerah yang jumlah desanya terbesar mendapatkan dana afirmasi kinerja karena keberhasilannya, tapi disisi lain tidak bisa dipungkiri, cukup banyak desa yang sebenarnya secara realita bisa maju, bahkan berkembang hingga mandiri justru turun jadi desa sangat tertinggal.

Padahal disisi lain tingkat pertumbuhan ekonomi Luwu Utara cukup tinggi, dan tingkat keparahan kemiskinan di Luwu Utara tidak dalam, yang berarti tidak terjadi kesenjangan pendapatan yang cukup tinggi selama masa pemerintahannya, rata-rata tiap tahunnya tingkat kemiskinan menurun sebesar 0,8%. Dari 14 indikator penilaian masyarakat miskin, 8 terkait dengan rumah. Setiap tahun diintervensi bedah rumah dengan APBD yang sebelumnya hanya mengandalkan APBN.

Masalah kemiskinan di Indonesia menyangkut hidup tani di pedesaan, pekerja, anak-anak, orang tua, penyandang cacat, bahkan pemuda-pemuda dari keluarga melarat. Dengan adanya Pasal 34 UUD 1945 yang menetapkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara⁶ berarti bahwa gagasan UUD 1945 tentang negara itu mengandung penerimaan akan proses ekonomi atau sistem

⁶ Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945

ekonomi yang memproduksi kemiskinan, sehingga memang akan selalu ada sebagian manusia yang dihukum untuk miskin bersama dengan anak-anak terlantar, dan oleh karena itu negara harus turun tangan untuk memelihara mereka. Dengan adanya program Raskin pemerintah berharap untuk dapat memenuhi sebagian kebutuhan pangan (beras) keluarga miskin sekaligus mengharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan ditingkat keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat pada tingkat harga bersubsidi dengan jumlah yang telah ditentukan.

Program beras untuk keluarga miskin atau yang lebih dikenal sebagai Raskin merupakan program nasional yang bertujuan untuk membantu rumah tangga Miskin (RTM) dalam memenuhi kebutuhan pangan. Program ini merupakan kelanjutan operasi pasar khusus bagi RTM. Evaluasi kebijakan Raskin selama ini lebih banyak menyorot masalah efektivitas pelaksanaan program seperti pencapaian indikator 6T: tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Sementara dampak kebijakan tersebut terhadap perubahan perilaku dan kesejahteraan penerima program belum dilakukan secara komprehensif.

Program Beras Miskin (Raskin) merupakan subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada rumah tangga sasaran.⁷ Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Selain itu Raskin bertujuan

⁷Widiarto & Surya, *Efektivitas Program Beras Miskin (Raskin) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan*, 2018.

untuk meningkatkan/membuka akses pangan keluarga melalui penjualan beras kepadakeluarga penerima manfaat dengan jumlah yang telah ditentukan. Program ini salah satu program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial di bidang pangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat berupa bantuan beras bersubsidi kepada rumah tangga berpendapatan rendah (Rumah Tangga Miskin dan Rentan Miskin). Penyaluran Raskin (beras untuk rumah tangga miskin) sudah dimulai sejak tahun 1998. Krisis moneter tahun 1998 merupakan awal pelaksanaan Raskin yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga terutama rumah tangga miskin. Pada awalnya disebut program Operasi Pasar Khusus (OPK), kemudian menjadi Raskin pada mulai tahun 2002, sesuai dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Raskin diperluas fungsinya tidak lagi menjadi program darurat melainkan sebagai bagian dari program perlindungan sosial masyarakat.⁸ Melalui sebuah kajian ilmiah, penamaan Raskin menjadi nama program diharapkan akan menjadi tepat sasaran dan mencapai tujuan Raskin. Namun permasalahan muncul seiring berlanjutnya program raskin. Persoalan pengelolaan yang muncul adalah pemeriksaan terhadap kualitas beras yang lemah, distribusi yang sering kali tidak mengutamakan orang miskin, dan pengelolaan uang hasil penjualan Raskin yang tidak terkontrol. Bahkan, ada kesan digunakan untuk program yang tidak tepat seperti kasus di sejumlah daerah. Titik rawan pada program Raskin adalah pada titik distribusi. Distribusi Raskin yang tidak transparan berpotensi terjadi penyimpangan.

Dari uraian di atas telah dikemukakan, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengelolaan Dana Bantuan Sosial dalam**

⁸ Saputro, *Implementasi Program Beras Untuk Masyarakat Miskin (Raskin) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan*, 2015.

Mengatasi Masalah Kemiskinan di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam karya tulis ini:

1. Bagaimana pengelolaan dana bantuan sosial di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara?
2. Bagaimana Dampak Program Bantuan Sosial Tunai (BST) dalam mengatasi kemiskinan di Kecamatan Tana Lili?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengelolaan bantuan sosial di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara
2. Untuk mengetahui dampak Program Bantuan Sosial Tunai (BST) dalam mengatasi kemiskinan di Kecamatan Tana Lili

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat di jadikan sebagai sumber acuan dalam pemanfaatan dana bantuan sosial kepada masyarakat dalam mengatasi masalah kemiskinan di Kabupaten Luwu Utara

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi dinas terkait dalam pembagian dana bantuan sosial kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
- b. Menambah referensi penulis terhadap pemanfaatan dana bantuan sosial dalam

mengatasi masalah kemiskinan di wilayah Kecamatan Tana Lili, Kabupaten
Luwu Utara



BAB II
TINJAUAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Nama Peneliti	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
Rima Fitriani	Strategi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Penanggulangan Kemiskinan Melalui Kartu Menuju Sehat	Proses pendataan keluarga miskin di Kota Yogyakarta yang akan mendapatkan KMS yaitu dengan menginventaris hasil konfirmasi data dari RT/RW/Kelurahan/Kecamatan atau pekerja sosial masyarakat (PSM). Kemudian melakukan konfirmasi data secara tatap muka pada ketua RT selanjutnya menindaklanjuti dengan melakukan verifikasi (Kunjungan Rumah) atas data hasil konfirmasi setelah itu hasil pendataan diserahkan ke Dinas Sosial Tenaga dan Transmigrasi sebagai penentuan tahap akhir warga penerima KMS. Strategi penanggulangan kemiskinan Dinas Sosial Kota Yogyakarta melalui kebijakan KMS yaitu memberikan akses pada masyarakat miskin	Menggunakan metode yang sama, variabel kemiskinan	Memiliki tujuan penelitian yang berbeda, lokasi yang berbed, penelitian sebelumnya menggunakan Tenaga Kerja dan Transmigrasi sedangkan pada penelitian ini menggunakan BANSOS

		<p>terhadap pelayanan pendidikan untuk memperoleh pendidikan yang bermutu guna penuntasan belajar wajib 12 tahun. Tujuan diberikannya jaminan pendidikan daerah adalah agar tidak ada anak usia putus sekolah dari pemegang KMS yang tidak bersekolah karena alasan biaya sehingga akses pendidikan dapat terjangkau di semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali.</p>		
Hikma wati	<p>Peran Dinas Sosial dalam Penyaluran Bantuan Sosial Sebagai Upaya Penanggulangan</p>	<p>dinas sosial dalam penyaluran bantuan sosial terhadap fakir miskin Perkotaan di Provinsi Lampung adalah sebagai representasi asas dekosentrasi dan tugas pembantuan dari Pemerintah pusat (Kementrian Sosial RI) kepada Pemerintah daerah (Dinas Sosial) dengan fungsi perumusan, penyelenggaraan, pembinaan dan pelaksanaan bantuan sosial di Provinsi Lampung dengan pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Faktor penghambat dalam pelaksanaan</p>	<p>Menggunakan metode yang sama dan tujuan yang mengenai dana BANSOS dalam mengatasi kemiskinan</p>	<p>Lokasi yang berbeda dan tujuan yang berbeda penelitian sebelumnya melibatkan peran dinas sosial untuk penyaluran BANSOS</p>

	<p>Kemiskinan di Perkotaan dan di Provinsi Lampung</p>	<p>penanggulangan penyaluran bantuan terhadap fakir miskin di Provinsi Lampung ada 2 diantaranya ;</p> <p>a. minimnya pengetahuan kelompok KUBE di Provinsi Lampung dalam membuat rekening untuk kepentingan bersama yang menghabiskan waktu cukup lama;</p> <p>b. Bahasa, terkadang saat sosialisasi dan evaluasi seksi pemberdayaan fakir miskin dinas sosial Provinsi Lampung mengalami kesulitan interaksi dengan anggota KUBE karena mereka terkadang masih sering menggunakan ba</p>		
<p>Didin Ismoyo</p>	<p>Peran Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan</p>	<p>Peran Pemerintah Desa Cangkol dalam penanggulangan kemiskinan. Pertama Pembangunan pertanian, kedua Pembangunan masyarakat terpadu, ketiga perbaikan pangan, keempat industrialisasi desa, kelima pembangunan masyarakat dan keterampilan masyarakat, keenam peningkatan kesehatan</p>	<p>Menggunakan peran pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan</p>	<p>Memiliki tujuan penelitian berbeda pada penelitian sebelumnya tidak menggunakan BANSOS dalam menanggulangi Kemiskinan</p>

		<p>masyarakat.</p> <p>Faktor yang mempengaruhi tingginya tingkat kemiskinan di desa Cangkol. Pertama faktor pengangguran, kedua faktor ketidaktepatan pendapatan, ketiga faktor sosial lingkungan, keempat faktor rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, kelima, faktor rasio ketergantungan penduduk, keenam penmanfaatan sumber daya pertanian belum optimal, ketujuh faktor kesehatan.</p>		
--	--	---	--	--

B. Kajian Teori

1. Pengelolaan Dana

a. Pengertian Pengelolaan Dana

Pengelolaan disebut juga dengan manajemen. Asal mula kata manajemen berasal dari bahasa perancis Kuno dari kata *Management*, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Manajemen dalam bahasa arab disebut dengan *idarah*, *idarah* diambil dari perkataan *adartasy-syai*'ah atau perkataan *adarta bihi* juga dapat didasarkan kepada kata *ad-dauran*.⁹

⁹ Mujamil Qomar, *Manajemen Islam*, (jakarta: Erlangga, 2005)

Manajemen menurut Mary Parker Follet (1997) adalah seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain dalam rangka pencapaian tujuan tertentu. Proses penyelesaian akan sesuatu memerlukan tahap-tahapan yang berupa perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan dan pengendalian.¹⁰

Sedangkan manajemen syariah adalah suatu pengelolaan untuk memperoleh hasil optimal yang bermuara pada pencarian keridhaan Allah. Oleh sebab itu maka segala sesuatu langkah yang diambil dalam menjalankan manajemen tersebut harus berdasarkan aturan-aturan Allah, yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadist.¹¹ Seni, yaitu merupakan keahlian, kemampuan, serta keterampilan dalam menerapkan prinsip, metode, dan teknik dalam menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam (human and natural resources) secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan.¹²

Manajemen diperlukan sebagai upaya agar kegiatan bisnis dapat berjalan secara efektif dan efisien. Agar manajemen mengarah kepada tujuan maka manajemen perlu dijelaskan berdasarkan fungsi-fungsinya atau dikenal sebagai fungsi manajemen. Fungsi manajemen menurut Nickels, Mchugh and Mchugh (1997) yaitu:

- 1) Perencanaan atau Planning yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat dalam mewujudkan target dan tujuan organisasi.
- 2) Pengorganisasian atau Organizing yaitu proses yang menyangkut bagaimana

¹⁰ Erni Tisnawati Sule, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2005

¹¹ [Http://www.PraktikManajemenSyariah](http://www.PraktikManajemenSyariah), diakses 7 Juli 2022

¹² Siswanto, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005

strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan bisa memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bisa bekerja secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan.

- 3) Pengimplementasian atau *Directing* yaitu proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktifitas yang tinggi.
- 4) Pengendalian dan pengawasan atau *Controlling* yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan dilaksanakan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan.¹³

2. Bantuan Sosial

a. Pengertian Bantuan Sosial

Salah satu cara pemerintah untuk mengatasi kemiskinan adalah dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu/miskin, yang disebut sebagai Bansos. Bansos ini dalam bentuk bantuan tunai maupun bantuan material, seperti dana BOS, Jamkesmas, PNPM-Mandiri, Raskin, Program Keluarga Harapan, dan lain-lain. Bansos adalah merupakan transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

¹³ Siswanto, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005

Bansos dapat diberikan secara langsung kepada masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan, sifatnya tidak terus menerus dan selektif. Bansos difokuskan untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat agar terlepas dari permasalahan rantai kemiskinan yang berkepanjangan, mendorong dan mempercepat pertumbuhan masyarakat miskin menjadi masyarakat produktif, mandiri dan sejahtera, dengan memperbaiki dan menyempurnakan kebijakan yang sudah ada.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang ada di kabupaten Luwu Utara ini kebanyakan masih hidup dibawah garis kemiskinan. Ini disebabkan oleh banyak hal yaitu karena kualitas SDM yang masih sangat rendah, banyaknya anak usia sekolah yang sudah tidak lagi bersekolah/putus sekolah, kurangnya kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anak-anak mereka, mereka cenderung memiliki anak lebih dari dua sehingga begitu banyak beban yang harus mereka tanggung, belum lagi lapangan kerja yang terbatas, serta upah minimum pekerja yang masih rendah. Rata-rata sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani, pembawa bentor, dan penjual kecil-kecilan, sehingga penghasilan mereka kebanyakan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada akhirnya banyak dari mereka yang terlibat hutang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) sesuai dengan Perpres No. 9 Tahun 2015, tentang Kemenko PMK bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan pembangunan manusia dan kebudayaan.¹⁴ Urusan ini salah satunya menjangkau program kesejahteraan rakyat, melalui pemberian bantuan sosial pada

¹⁴ Perpres No. 9 Tahun 2015, tentang Kemenko PMK

masyarakat. Bantuan ini diberikan untuk memenuhi dan menjamin kebutuhan dasar serta meningkatkan taraf hidup penerima bansos.

Fungsi ini juga sejalan dengan amanat dalam Impres Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif.¹⁵ Menko PMK dalam hal ini dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat bagi keluarga kurang mampu dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dan dunia usaha. Diantaranya dengan meningkatkan koordinasi pelaksanaan dan pengawasan, penanganan pengaduan masyarakat, dan meningkatkan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program.

Program Program Bansos untuk Rakyat mencakup Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Program Keluarga Harapan (PKH), Program Bedah Rumah dan Program Bantuan Kelompok Tani. Perluasan program bantuan sosial merupakan komitmen pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Hal ini terlihat dari menurunnya angka kemiskinan dari 11,22% pada tahun 2015, menjadi 9,82% pada tahun 2018. Gini rasio juga berkurang dari 0,408 pada tahun 2015 menjadi 0,389 pada tahun 2018. Sementara Indeks Pembangunan Manusia Naik dari 68,90 pada tahun 2014 menjadi 70,81 pada tahun 2017.

¹⁵ Impres Nomor 7 Tahun 2014

b. Macam-macam Bantuan Sosial

1) Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Bantuan Langsung Tunai (BLT) pertama kali diterapkan pada tahun 2020. Bantuan Langsung Tunai atau disingkat BLT adalah program bantuan pemerintah berupa bantuan uang tunai atau dapat juga beragam bantuan lainnya baik bersyarat maupun tidak bersyarat yang diberikan kepada masyarakat miskin. Besaran dana yang diberikan dan mekanisme yang dilakukan dalam program BLT berbeda-beda tergantung kebijakan pemerintah di Negara tersebut. Indonesia merupakan salah satu negara penyelenggara BLT dengan mekanisme berupa pemberian uang, pangan, serta jaminan kesehatan dan pendidikan. Tahapan pelaksanaan program bantuan langsung tunai di Indonesia umumnya dimulai dari sosialisasi, verifikasi data, pembagian kartu, pencairan dana serta pembuatan laporan dan evaluasi (Wikipedia, 2022).¹⁶

Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang besar bagi masyarakat, tidak hanya berdampak di bidang kesehatan, namun telah berdampak juga bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, maka menjadi dasar juridis pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin yang tinggal di desa. BLT yang bersumber dari Dana Desa atau dikenal dengan BLT-Dana Desa dilakukan selama 3 bulan, terhitung dari bulan April 2020 menggunakan sistem

¹⁶ Wikipedia, 2022 diakses 7 Juli 2022

cashless atau non tunai (Suari, 2021).

2) Program Keluarga Harapan

- a) Program Keluarga Harapan, merupakan program bansos untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan melibatkan partisipasi kelompok penerima manfaat dalam menjaga kesehatan dan menyekolahkan anak-anaknya.
- b) Perluasan PKH ditingkatkan dari 2,8 juta KPM (tahun 2014), menjadi 6 juta KPM (tahun 2016), dan diperluas menjadi 10 juta KPM tahun 2018 Nilai bansos yang diterima KPM adalah Rp 1.890.000,-/tahun/KPM.

3) Program Bedah Rumah

Program Bedah Rumah adalah program yang ditujukan pemerintah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni. Standar layak huni adalah persyaratan kecukupan luas, kualitas, dan kesehatan yang harus dipenuhi suatu bangunan rumah. Kriteria Dan Persyaratan Bedah Rumah Berdasarkan peraturan menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2016 yaitu:¹⁷

- a) Warga Negara Indonesia
- b) MBR dengan penghasilan tetap atau tidak tetap
- c) Sudah Berkeluarga
- d) Memiliki atau Menguasai Tanah
- e) Belum memiliki rumah atau memiliki rumah tetapi tidak layak huni
- f) Belum pernah mendapat Bantuan Stimulan Perumahan dari Kementerian

¹⁷ PUPR Nomor 13/PRT/M/2016

- g) Perumahan Rakyat Didahulukan yang telah memiliki rencana membangun atau meningkatkan kualitas rumah.
 - h) Didahulukan yang sudah diberdayakan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.¹⁸
- 4) Program Bantuan Kelompok Tani

Menurut Purwanto (2007), kelompok tani adalah kumpulan petani-nelayan yang didasarkan atas kesamaan, keserasian satu lingkungan sosial budaya untuk mencapai tujuan yang sama. Kelompok tani adalah kumpulan petani, peternak, pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (social, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.¹⁹

Menurut Mardikanto (1993) pengertian kelompok tani adalah sekumpulan orang-orang tani atau petani yang terdiri dari petani dewasa (pria/wanita) maupun petani taruna (pemuda/i), yang terikat secara informal dalam suatu wilayah kelompok atas dasar keserasian dan kebutuhan bersama serta berada di lingkungan pengaruh dan pimpinan seorang kontak tani.²⁰

c. Syarat Penerima Bantuan Sosial

Pemberian bantuan sosial harus memenuhi kriteria sebagaimana diatur dari pasal 24 Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagai berikut: ²¹

- 1) Kriteria selektif, yang diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada

¹⁸ Peraturan menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2016

¹⁹ Purwanto, Penguatan Kelompok Tani dalam Mendukung Pembangunan Pertanian di Jawa Timur, 2007

²⁰ Mardikanto, Penyuluhan Pembangunan Kehutanan, 1993

²¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Pasal 24 Tahun 2011, tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial. Kriteria memenuhi persyaratan penerima bantuan sosial meliputi :

- 2) Memiliki identitas yang jelas.
- 3) Berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah.
- 4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus yang diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran ; serta kriteria kecuali dalam keadaan tertentu yang dapat berkelanjutan, artinya bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

Sesuai tujuan penggunaan, yang meliputi :

- 1) Rehabilitas sosial
- 2) Perlindungan sosial
- 3) Pemberdayaan sosial
- 4) Jaminan sosial
- 5) Penanggulangan kemiskinan
- 6) Penanggulangan bencana

d. Tujuan Bantuan Sosial

Secara khusus, tujuan Bantuan Sosial terdiri atas :²²

- 1) Rehabilitas sosial yang sebagaimana dimaksud, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- 2) Perlindungan sosial ditujukan untuk menjaga dan menangani resiko sosial

²² Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Pasal 25 Tahun 2011, tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

- 3) Pemberdayaan sosial yang ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial sehingga mempunyai daya yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- 4) Jaminan sosial merupakan suatu skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan sosial agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- 5) Penanggulangan kemiskinan merupakan program dan kegiatan yang dilakukan oleh orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencahariaan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan\
- 6) Penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitas.

e. Indikator Efektifitas Bantuan Sosial

Bantuan sosial dapat dilihat dari berbagai indikator, yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.²³

1) Ketepatan Sasaran

Ketepatan sasaran yaitu indikator yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana suatu program atau kegiatan untuk mencapai sasaran/target yang ingin dicapai, ketetapan sasaran sangat mendukung pelaksanaan sebuah program.

²³Melati dan Zulkarnaini, “ Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Pasir Pangaraian”, *Jurnal Publicuho*, Vol.4 no.1 (2021): 23.<http://ojs.uho.ac.id/index.php/PUBLICUHO/article/view/16021>.

2) Sosialisasi Program

Sosialisasi program merupakan titik awal yang menentukan keberhasilan program. Hal tersebut dilakukan untuk melihat bagaimana kemampuan penyelenggara terkait program BST dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat penerima program BST.

3) Tujuan Program

Tujuan program yaitu sejauhmana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya. Tujuan dari program BST ini adalah untuk menjaga daya beli masyarakat.

3. Kemiskinan

a. Definisi Kemiskinan Secara Umum

Secara umum, kemiskinan diartikan sebagai kondisi ketidak mampuan pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokok sehingga kurang mampu untuk menjamin kelangsungan hidup.²⁴ Kemampuan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan pokok berdasarkan standar harga tertentu adalah rendah sehingga kurang menjamin komputer standar kualitas hidup pada umumnya. Berdasarkan pengertian ini, maka kemiskinan secara umum didefinisikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya yang dapat menjamin komputer standar kualitas hidup.

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak komputer hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan

²⁴ Mudrajat Kuncoro, *Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomika Pembangunan*,(Erlangga 2010)

yang bermartabat.²⁵ Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik. Laporan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dikeluarkan oleh Kementrian Bidang Kesejahteraan (Kesra) tahun 2004 menerangkan pula bahwa kondisi yang disebut miskin ini juga berlaku pada mereka yang bekerja akan tetapi pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok/dasar.²⁶

Definisi kemiskinan kemudian dikaji kembali dan diperluas berdasarkan permasalahan-permasalahan kemiskinan dan faktor-faktor yang selanjutnya menyebabkan menjadi miskin. Definisi kemiskinan yang dikemukakan oleh *Chambers* adalah definisi yang saat ini mendapatkan perhatian dalam setiap program pengentasan kemiskinan di berbagai negara-negara berkembang dan dunia ketiga. Pandangan yang dikemukakan dalam definisi kemiskinan dari *Chambers* menerangkan bahwa kemiskinan adalah suatu kesatuan konsep (*integrated concept*) yang memiliki lima dimensi, yaitu:

1) Kemiskinan (*Proper*)

Permasalahan kemiskinan seperti halnya pada pandangan semula adalah kondisi ketidakmampuan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan- kebutuhan pokok. Konsep atau pandangan ini berlaku tidak hanya pada kelompok yang tidak memiliki pendapatan, akan tetapi dapat berlaku pula pada kelompok

²⁵ Undang-Undang No. 24 Tahun 2004

²⁶ Kementrian Bidang Kesejahteraan (Kesra) tahun 2000

yang telah memiliki pendapatan.²⁷

2) Ketidak berdayaan (*Powerless*)

Pada umumnya, rendahnya kemampuan pendapatan akan berdampak pada kekuatan sosial (*social power*) dari seseorang atau sekelompok orang terutama dalam memperoleh keadilan ataupun persamaan hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

3) Kerentanan menghadapi situasi darurat (*State of emergency*)

Seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin tidak memiliki atau kemampuan untuk menghadapi situasi yang tidak terduga di mana situasi ini membutuhkan alokasi pendapatan untuk menyelesaikannya. Misalnya, situasi rentan berupa bencana alam, kondisi kesehatan yang membutuhkan biaya pengobatan yang relatif mahal, dan situasi-situasi darurat lainnya yang membutuhkan kemampuan pendapatan yang dapat mencukupinya. Kondisi dalam kemiskinan dianggap tidak mampu untuk menghadapi situasi ini

4) Ketergantungan (*dependency*)

Keterbatasan kemampuan pendapatan ataupun kekuatan sosial dari seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin tadi menyebabkan tingkat ketergantungan terhadap pihak lain adalah sangat tinggi. Mereka tidak memiliki kemampuan atau kekuatan untuk menciptakan solusi atau penyelesaian masalah terutama yang berkaitan dengan penciptaan pendapatan

²⁷ Whisnu Adhi Saputra, "Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah", Semarang 2011, skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang hlm 16-21

baru. Bantuan pihak lain sangat diperlukan untuk mengatasi persoalan-persoalan terutama yang berkaitan dengan kebutuhan akan sumber pendapatan.

5) Keterasingan (*Isolation*)

Dimensi keterasingan seperti yang dimaksudkan oleh *Chambers* adalah faktorlokasi yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin. Pada umumnya, masyarakat yang disebut miskin ini berada pada daerah yang jauh dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan sebagian besar fasilitas kesejahteraan lebih banyak terkonsentrasi di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi seperti di perkotaan atau kota-kota besar. Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh fasilitas-fasilitas kesejahteraan relatif memiliki taraf hidup yang rendah sehingga kondisi ini menjadi penyebab adanya kemiskinan.

Kemiskinan dapat dipisahkan menjadi tiga yaitu kemiskinan absolut, relatif dan budaya. Masyarakat yang masuk dalam miskin absolut jika pendapatannya di bawah garis kemiskinan serta tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan dan pendidikan.²⁸ Miskin relative sebenarnya hidup di atas garis kemiskinan tetapi masih di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Miskin budaya lebih kepada sikap seseorang atau kelompok yang tidak ingin mencoba meningkatkan taraf hidupnya dan lebih memilih bantuan dari orang lain. Terdapat berbagai macam bentuk dan model kemiskinan mulai dari kelompok

²⁸ Ari Kristin Prasetyoningrum dan U. Sulia Sukmawari. "Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia", Volume 6, Nomor 2, 2018, 217 – 240, hlm. 219

sosial, lokasi dan negara.

Terdapat enam dimensi utama masyarakat miskin dalam kemiskinan, dimensi tersebut sebagai berikut :²⁹

- 1) Kemiskinan terdiri dari banyak dimensi yang saling bertautan. Meskipun kemiskinan jarang tentang kurangnya hanya satu hal, intinya adalah selalu kelaparan, kekurangan makanan.
- 2) Kemiskinan memiliki dimensi psikologis yang penting, seperti ketidakberdayaan, tidak bersuara, ketergantungan, rasa malu, dan penghinaan. Pemeliharaan identitas budaya dan norma sosial solidaritas membantu orang miskin untuk terus percaya pada kemanusiaan mereka sendiri, meskipun kondisi tidak manusiawi.
- 3) Orang miskin tidak memiliki akses ke infrastruktur dasar, jalan (terutama di daerah pedesaan), transportasi, dan air bersih.
- 4) Meskipun ada rasa haus yang meluas untuk melek huruf, sekolah menerima sedikit sekali penyebutan atau ulasan yang beragam. Orang miskin menyadari bahwa pendidikan menawarkan pelarian dari kemiskinan tetapi hanya jika lingkungan ekonomi dalam masyarakat luas dan kualitas pendidikan membaik.
- 5) Kesehatan dan penyakit yang buruk sangat ditakuti di mana-mana sebagai sumber kemelaratan. Ini terkait dengan biaya perawatan kesehatan dan juga pendapatan yang hilang karena sakit.

²⁹ Arsyad, Lincoln (2005), "*Ekonomi Pembangunan Edisi Kelima*", STIE YKPN, Yogyakarta. Hlm. 277-278

- 6) Masyarakat miskin jarang berbicara tentang pendapatan, tetapi fokus pada pengelolaan aset seperti fisik, manusia, sosial, dan lingkungan sebagai cara untuk mengatasi kerentanan mereka. Di banyak wilayah kerentanan ini memiliki dimensi gender.

Ada beberapa penyebab kemiskinan antara lain yaitu:

- 1) Kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi alami seseorang misalnya, cacat mental atau fisik, usia lanjut sehingga tidak mampu bekerja dan lain-lain.
- 2) Kemiskinan yang disebabkan oleh alam misalnya, kondisi alam yang tidak bersahabat dengan daerah per penduduk sehingga menyebabkan masyarakat tidak bisa melakukan aktivitasnya masing-masing.
- 3) Kemiskinan yang disebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM). Akibat cultural masyarakat tertentu misalnya, rasa malas, tidak produktif, teralubergantung pada harta warisan, dan lain-lain

b. Program Penanggulangan Kemiskinan

Meningkatkan efektivitas dalam upaya penanggulangan kemiskinan Presiden telah mengeluarkan Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang 14 Penanggulangan Kemiskinan, yang bertujuan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan hingga 8% sampai 10% pada akhir tahun 2014.³⁰ Melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) ditingkat pusat yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Sedangkan diprovinsi dan kabupaten/kota dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal ini telah mengklasifikasikan

³⁰ Perpres No. 15 Tahun 2010

kebijakan dalam tiga kelompok (cluster) yaitu sebagai berikut:³¹

1) Klaster I

Kelompok kebijakan penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial terpadu berbasis keluarga. Tujuannya adalah mengurangi beban rumah tangga miskin melalui peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih, dan sanitasi. Mekanisme pelaksanaan program bersifat langsung dan klasifikasi program ini meliputi program Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Bantuan Siswa Miskin (BSM), Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN).

2) Klaster II

Kelompok kebijakan berbasis pemberdayaan masyarakat. Tujuannya adalah mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip. Jenis program klaster II adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), dan Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja/Padat Karya Produktif.

3) Klaster III

Kebijakan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Tujuannya adalah memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Program pada klaster III adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan Kredit Usaha Bersama (KUBE).

³¹ Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial

c. Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat sangat relevan sebagai paradigma kebijakan desentralisasi dalam penanganan masalah sosial termasuk masalah kemiskinan. Badan Pusat Statistik menjelaskan bahwa ada beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam penanggulangan kemiskinan, diantaranya adalah melalui kebijakan makro ekonomi, pendekatan kewilayahan, dan pendekatan pemenuhan hak-hak dasar kebutuhan manusia.³² Kebijakan makro ekonomi untuk menanggulangi kemiskinan adalah dengan cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi, stabilitas ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Pendekatan kewilayahan yang digunakan untuk menanggulangi kemiskinan adalah dengan percepatan pembangunan perdesaan, pembangunan perkotaan, pengembangan kawasan pesisir, dan percepatan pembangunan di daerah tertinggal. Sedangkan melalui pendekatan pemenuhan hak-hak dasar adalah dengan melakukan pemenuhan hak atas pangan, sandang, pendidikan, kesehatan, akses terhadap sumber daya sosial dan ekonomi, kegiatan usaha produktif, perumahan air bersih dan rasa aman. Sedangkan menurut Nurcahya (2020), strategi penanggulangan kemiskinan daerah telah menjadi acuan bagi pemerintah dalam menyusun PERDA, aplikasinya perlu pengawasan dan disusun program yang lebih praktis. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diambil kebijakan pembangunan yang berpihak pada penanggulangan kemiskinan, yang di antara lain meliputi: optimalisasi pemanfaatan APBD, penajaman program-program, pengarahan dana pinjaman dan hibah, sinkronisasi kegiatan perencanaan,

³² Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

pelaksanaan dan pemantauan, serta pelibatan pentahelix.³³

d. Indikator Kemiskinan

Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan absolut sebagai hidup dengan pendapatan di bawah US\$1/hari. Indikator kemiskinan yang lain dikemukakan oleh Bappenas dalam Sahlan berupa :

- 1) Kurangnya pangan, sandang, dan perumahan yang tidak layak.
- 2) Terbatasnya kepemilikan tanah dan alat-alat produktif.
- 3) Kurangnya kemampuan membaca dan menulis
- 4) Kurangnya jaminan dan kesejahteraan hidup
- 5) Kerentanan dan keterpurukan dalam bidang sosial dan ekonomi
- 6) Ketidakberdayaan atau daya tawar yang rendah
- 7) Akses ke ilmu pengetahuan yang terbatas.³⁴

e. Kemiskinan dalam Pandangan Islam

Di dalam Islam, kemiskinan dipandang sebagai masalah yang membahayakan jiwa dan iman seseorang karena sangat dekat dengan kekufuran. Dengan hidup miskin, seseorang tidak dapat melaksanakan kewajiban agama secara maksimal, tidak dapat mengejar pendidikan yang baik, dan akses kehidupan dan kesehatan yang layak. Oleh karena itu, Islam melarang umatnya meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah, baik secara agama, ilmu, maupun ekonomi (kesejahteraan),

³³ Nurcahya 2020

³⁴ Ari Kristin Prasetyoningrum dan U. Sulia Sukmawari. "Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia", Volume 6, Nomor 2, 2018, 217 – 240, hlm. 219

sebagaimana Allah berfirman Q.S. An-Nisa': 9.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۙ

Terjemahnya : Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah dibelakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka, dan hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka bertutur kata yang benar

C. Kerangka Pikir

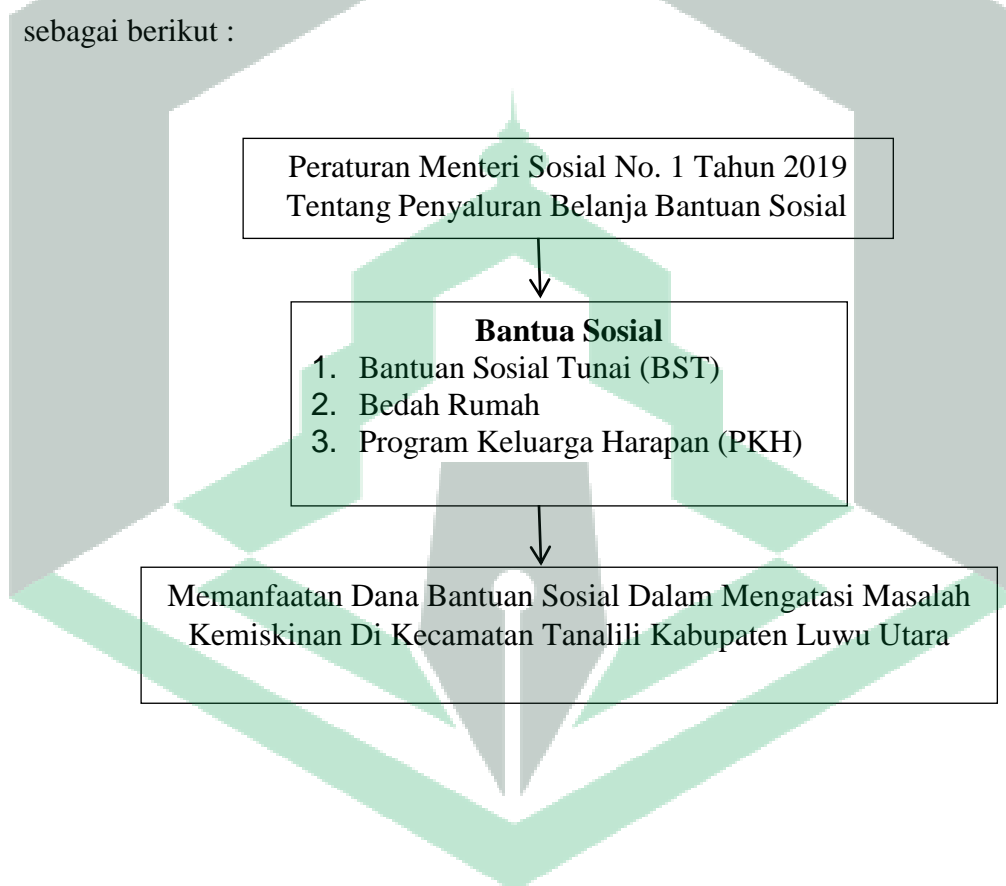
Kerangka Pikir merupakan model tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting dalam sebuah proses penelitian. Kerangka ini didapatkan dari Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial.³⁵

Pelaksanaan bantuan sosial (Bansos) ini dapat dilihat dari hasil program yang sudah dilaksanakan apakah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak. Maka dalam hal ini untuk membuat pelaksanaan program bantuan sosial (Bansos) ini berjalan dengan efektif maka harus dengan kerjasama yang baik serta harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam program pelaksanaan bantuan sosial (Bansos).

Dalam hal ini pemerintah memberdayakan Kepala Desa dalam pendistribusian bantuan sosial (Bansos) yang dimana juga perangkat desa pun ikut terjun dalam proses pelaksanaan program bantuan sosial ini untuk membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin. Karena pada dasarnya bantuan sosial ini dilakukan untuk membantu masyarakat miskin. Pemerintah menyelurkan bantuan sosial kepada

³⁵ Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial

Kepala Desa serta perangkat desa lainnya. Karena dalam hal ini dianggap bahwa Kepala Desa lebih paham tentang masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan sosial ini, sehingga untuk mewujudkan pelaksanaan bantuan sosial ini secara efektif maka harus dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan program bantuan sosial ini dengan baik dan harus berjalan dengan terbuka atau harus transparan sehingga tidak ada terjadi penyimpangan serta hal-hal yang berbau dengan korupsi. Adapun kerangka pikir pada penelitian ini adalah sebagai berikut :



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris karena penulis melakukan penelitian untuk mengetahui pengelolaan dana bantuan pemanfaatan dan bantuan sosial dalam mengatasi masalah kemiskinan di kecamatan Tana Lili kabupaten Luwu Utara.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah pengelolaan dana bansos untuk mengurangi kemiskinan masyarakat Kecamatan Tana Lili adapun jenis bansos yang diterima yaitu BLT, PKH, dan Bedah Rumah.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi pada penelitian ini terletak di Kecamatan Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Waktu penelitian dilakukan pada tanggal 12 Mei 2023.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti wawancara atau hasil pengisian

kuesioner. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung di lapangan yaitu dengan melakukan wawancara kepada informan dengan teknik purposive sampling. Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang dapat memberikan informasi terkait penelitian pengelolaan dana bantuan pemanfaatan dana bantuan sosial dalam mengatasi masalah kemiskinan di kecamatan Tana Lili kabupaten luwu utara. Sumber data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu pengelolaan dana bantuan . Sumber sekunder lainnya penulis dapatkan dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*), buku-buku hukum, jurnal, situs-situs hukum dari internet dan literatur lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari salah satu atau beberapa sumber data yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini digunakan tiga jenis metode pengumpulan data, antara lain:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah observasi merupakan alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. pada pengelolaan dana bantuan pemanfaatan dan bantuan sosial dalam mengatasi masalah kemiskinan di kecamatan Tana Lili kabupaten luwu utara. Dengan observasi ini penelitian juga dapat memperoleh kelengkapam data untuk dianalisis.

2. Wawancara

Wawancara adalah jalan mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Jenis wawancara yang penulis gunakan adalah

wawancara bebas terpimpin atau bebas struktural dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendalian arah proses wawancara tidak kehilangan arah. Metode wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan bertatap muka secara fisik dan bertanya jawab dengan nasabah bantuan sosial dan staf dari kantor camat Tana Lili.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara mengambil data dari dokumen yang merupakan suatu pencatatan formal dengan bukti otentik.

F. Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini memakai beberapa macam uji keabsahan, antara lain :

1. Kepercayaan (*kreadibility*)

Kreadibilitas data dimaksudkan untuk membuktikan data yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan sebenarnya. Ada beberapa teknik untuk mencapai kreadibilitas ialah teknik : perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, dan *membercheck*.³⁶

2. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber diluar data sebagai bahan perbandingan. Kemudian dilakukan *cross check* agar hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua triangulasi yaitu triangulasi sumber data dan triangulasi metode. Hal ini sesuai dengan saran Faisal untuk mencapai standar kredibilitas hasil penelitian setidaknya

³⁶ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis Ekonomi*, (yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019.,270

tidaknya menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi metode.³⁷

3. Memperpanjang pengamatan

Memperpanjang pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan memperpanjang pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk *rapport* (hubungan), semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.

Perpanjangan pengamatan ini, peneliti melakukan penggalian data secara lebih mendalam supaya data yang diperoleh menjadi lebih konkrit dan valid. Peneliti datang ke lokasi penelitian walaupun peneliti sudah memperoleh data yang cukup untuk dianalisis, bahkan ketika analisis data, peneliti melakukan *cross check* di lokasi penelitian.³⁸

4. Pemeriksaan sejawat

Pemeriksaan sejawat melalui diskusi yaitu teknik yang dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat. Dari informasi yang berhasil digali, diharapkan dapat terjadi perbedaan pendapat yang akhirnya lebih memantapkan hasil penelitian.³⁹

³⁷ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis Ekonomi*, (yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019),273-275.

³⁸ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis Ekonomi*, (yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019),.270-271.

³⁹Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis Ekonomi*, (yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019),.276.

5. Ketergantungan (*dependability*)

Kriteria ini digunakan untuk menjaga kehati – hatian akan terjadinya kemungkinan kesalahan dalam mengumpulkan dan menginterpretasikan data sehingga data dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kesalahan sering dilakukan oleh manusia itu sendiri terutama peneliti karena keterbatasan pengalaman, waktu, pengetahuan. Cara untuk menetapkan bahwa proses penelitian dapat dipertanggungjawabkan melalui audit *dependability* oleh *ouditor independent* oleh dosen pembimbing.

6. Kepastian (*konfermability*)

Kriteria ini digunakan untuk menilai hasil penelitian yang dilakukan dengan cara mengecek data dan informasi serta interpretasi hasil penelitian yang didukung oleh materi yang ada pada pelacakan audit.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema, dan dirumuskan tema dan hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data. Prinsip utama dalam analisa data adalah bagaimana menjadikan data atau informasi yang telah dikumpulkan disajikan dalam bentuk uraian dan sekaligus memberikan makna atau interpretasi sehingga informasi tersebut memiliki signifikansi ilmiah atau teoritis.⁴⁰

Analisa data penelitian bersifat kualitatif, deskriptif dan interpretatif. Seluruh data diperoleh dari berbagai sumber baik studi dokumentasi, ditranskripsikan dalam bentuk tulisan dan pendeskripsian ini bersifat interpretatif.

⁴⁰ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997),

Data perolehan hasil penelitian selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan interpretatif yaitu dengan melalui beberapa proses seperti:

Penelitian ini teknik pengelolaan data dan analisis data yang digunakan adalah :

1. Mereduksi data

Reduksi data diawali dengan merangkai atau menyatukan, menentukan hal yang pokok, memusatkan pada hal yang dibutuhkan, sehingga data yang telah dirangkum bisa memberikan keterangan yang lebih jelas mengenai hasil yang telah diamati. Dalam proses reduksi, ada data yang terpilih dan ada data yang terbuang.

2. Menyajikan data

Setelah data direduksi, dilanjutkan dengan mendisplay data. Proses mendisplay data yaitu menampilkan data secara sederhana dalam bentuk kata-kata dan kalimat dengan maksud agar data yang telah dikumpulkan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan yang tepat.

3. Penarikan kesimpulan

Tahap akhir setelah mendisplay data yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan merupakan proses menarik intisari dari kata-kata yang dikumpulkan berupa pernyataan kalimat yang tepat yang memiliki data yang jelas. Setelah itu, kesimpulan diverifikasi untuk mengetahui kebenarannya dengan tujuan mendapat kesimpulan akhir yang lebih jelas.⁴¹

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2011) 62.

H. Definisi Istilah

1. Pengelolaan

Pengelolaan adalah suatu aktivitas pemanfaatan serta pengolahan sumber daya yang akan digunakan dalam kegiatan untuk mencapai atau tujuan tertentu

2. Bantuan Sosial

Bansos dapat diberikan secara langsung kepada masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan, sifatnya tidak terus menerus dan selektif. Bansos difokuskan untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat agar terlepas dari permasalahan rantai kemiskinan yang berkepanjangan, mendorong dan mempercepat pertumbuhan masyarakat miskin menjadi masyarakat produktif, mandiri dan sejahtera, dengan memperbaiki dan menyempurnakan kebijakan yang sudah ada.

3. Kemiskinan

Kemiskinan secara umum didefinisikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya yang dapat menjamin komputer standar kualitas hidup.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kecamatan Tana Lili

Tana Lili adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, yang sebelumnya merupakan kecamatan pemekaran dari kecamatan Bonebone yang dimekarkan pada tanggal 05 Juni 2012. Kecamatan Tana Lili terdiri dari 10 desa, yaitu Desa Bungapati sebagai pusat kecamatan, Desa Munte, desa Patila, Desa Rampoang, Karondang, Sidomakmur, Sidomukti, Sidobinangun, Bungadidi serta Desa Poreang. Luas Kecamatan Tana Lili 149,41 Km² dengan total populasi 22,245 jiwa di bawa pemerintahan Jahir, S.Sos.

2. Visi Misi Kecamatan Tana Lili

a. Visi

“Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Prima Yang Efektif, Efesien dan Akuntabel”

b. Misi

- 1) Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan Tana Lili
- 2) Meningkatkan pelayanan prima yang efektif, efesien dan akuntabel.
- 3) Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung.

3. Sarana Pendidikan di Kecamatan Tana Lili

Tabel 4.1 Sarana Pendidikan TK di Kecamatan Tana Lili

No	Nama Sekolah
1	TK PEMBINA TANA LILI
2	TK ABA SIDOBINANGUN
3	TK AINA
4	TK AISYIYAH KARONDANG
5	TK BAKTI AL-MULYA
6	TK BINA KASIH RANTEPULIO
7	TK MAWAR
8	TK MELATI POREANG
9	TK MUTIARA BUNGAPATI
10	TK NURUL TARBIYAH
11	TK PKK BUNGAPATI
12	TK RAODATUL ILMI
13	TK TUNAS HARAPAN
14	TK ZAHRA ILHAM
15	TK KARYA BAKTI

Tabel 4.2 Sarana Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Tana Lili

No	Nama Sekolah
1	UPT SD NEGERI 226 SIDOMAKMUR

2	UPT SD NEGERI 227 PATILA
3	UPT SD NEGERI 228 PEMBASEAN
4	UPT SD NEGERI 229 SIDOBINANGUN
5	UPT SD NEGERI 230 TONDO TANGGA
6	UPT SD NEGERI 231 RAMPOANG
7	UPT SD NEGERI 232 KARONDANG
8	UPT SD NEGERI 233 MUNTE
9	UPT SD NEGERI 234 SUMBERDADI
10	UPT SD NEGERI 235 MINA
11	UPT SD NEGERI 236 BERINGIN
12	UPT SD NEGERI 237 BUNGADIDI
13	UPT SD NEGERI 237 BUNGADIDI
14	UPT SD NEGERI 238 KULURI
15	UPT SD NEGERI 239 TANETE
16	UPT SD NEGERI POREANG
17	UPT SD NEGERI 241 BUNGAPATI
18	UPT SD NEGERI 242 TULUNG REJO

4. Jumlah Penerima Bansos Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara

No	Jenis Bansos	Jumlah Penerima
1	BST (Bantuan Sosial Tunai)	978 KK

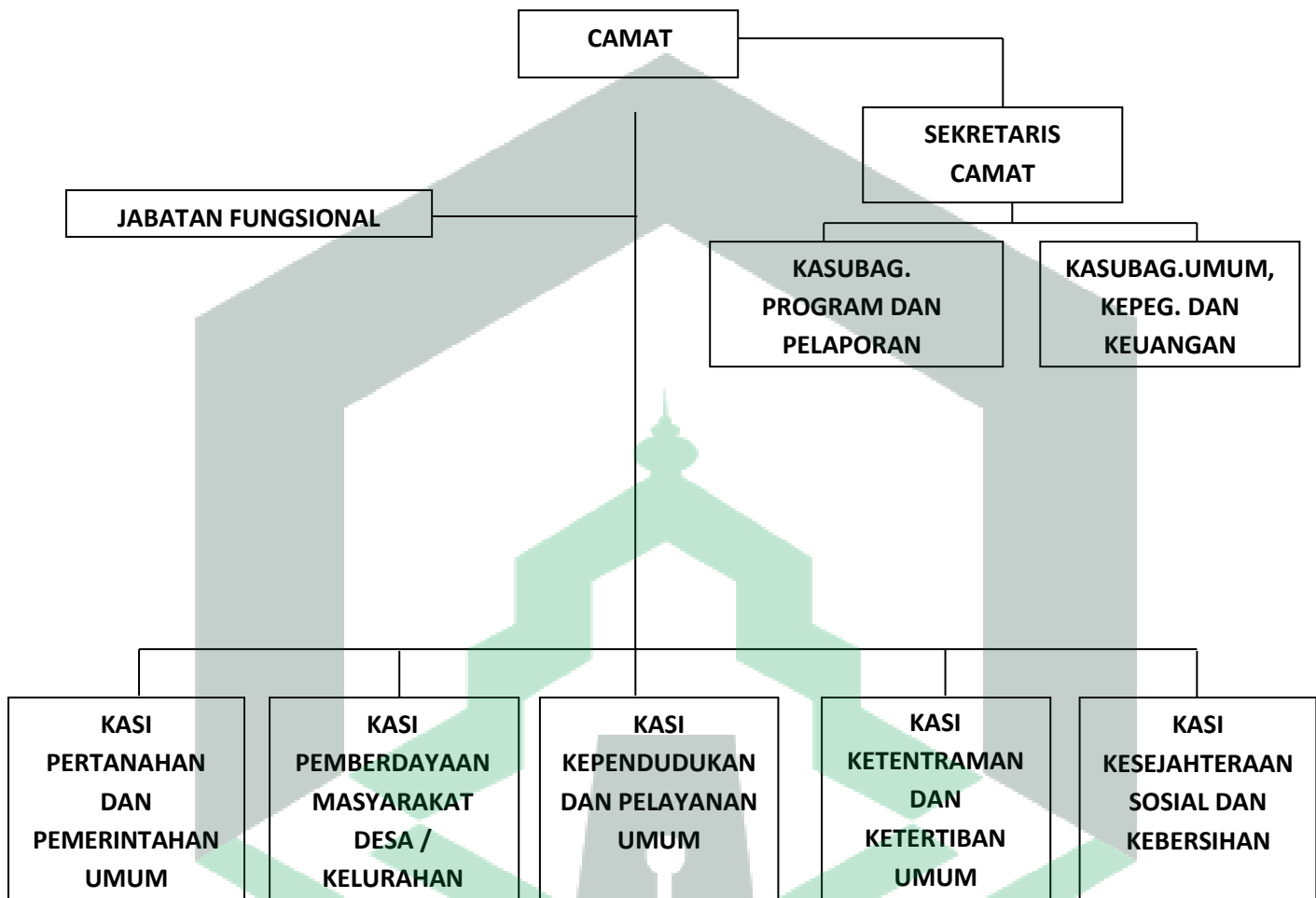
2	PKH (Program Keluarga Harapan)	140 KK
3	Bedah Rumah	78 KK

5. Struktur Pemerintahan Kecamatan Tana Lili

Struktur Organisasi Kantor Camat Tana Lili berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 60 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata melaksanakan kewenangan Kerja Jabatan Struktural pada Kecamatan Tana Lili, Mappedeceng, Baebunta dan Sabbang Kabupaten Luwu Utara, dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Camat
- b. Sekretariat Kecamatan
 - 1) Sub Bagian Program dan Pelaporan
 - 2) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan
- c. Seksi Pertanahan dan Pemerintahan Umum
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- e. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
- f. Seksi Kependudukan dan Pelayanan Umum
- g. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kebersihan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN TANA LILI



B. Hasil Penelitian

1. Pengelolaan Dana Bantuan Sosial di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara

Pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Tunai tidaklah mudah, berbertahap demi tahap yang dilakukan pengurus pelaksana penyaluran Bansos. Peneliti telah melakukan wawancara dengan Aparat bagaimana proses penyaluran Bansos tersebut,

“ Menurut Pak Hamzah L, S.An sebagai Seksi Pemberdayaan Masyarakat

dan Kelurahan dalam wawancaranya menjelaskan bahwa terkait penyaluran BST di kelurahan rampoang, perlu kami sampaikan bahwa yang harus kami pahami terlebih dahulu nama-nama penerima Bansos sebenarnya dari pusat, itu dinas pusat melalui dinas sosial kemudian dipercayakan ke kantor pos. Makadi kantor pos yang mencetak blangkonya itu, lalu kemudian pihak kantorpos menyerahkan ke kelurahan. Nanti di kelurahan kita bagi-bagi ke RW/RT untuk memudahkan penyaluran kepada masyarakat yang sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh pihak kantor pos. setelah tiba ditangan RW/RT merekalah yang membagikan kemasyarakat, nanti masyarakat langsung ke kantor pos, tetapi kami tetap mendampingi di kantor pos dalam hal pengambilan insentif atau uang bantuan itu, karena ditakutkan jangan sampai ada kendala berupa beda nama, beda nik, beda alamat, dan nama yang bersangkutan ada tetapi bukan orangnya yang datang tapi masih 1 kknnya. Itu semualah kita kordinasikan ke pihak kantor pos, bagaimana solusinya yang terbaik supaya masyarakat bisa mendapatkan bantuan sosial itu”.⁴²

Tahap pelaksanaan penyaluran bantuan sosial di Kecamatan Tana Lili telah disalurkan dalam beberapa tahapan. Penetapan bagi penerima harus sudah memenuhi kriteria komponen. Penyaluran bantuan di Kecamatan Tana Lili tersebut diberikan dengan berbagai ketentuan dan prosedur dalam penyaluranbantuan sosial. Mengenai proses penyaluran bantuan sosial di Kecamatan Tana Lili hal serupa juga di kemukakan oleh ibu Herni, S.Ag. SE sebagai sekretaris bahwa :

”Proses penyaluran bantuan BST di kelurahan rampoang sudah berjalandengan baik sesuai dengan yang dikeluarkan oleh Kementrian Sosial,dan sudah mematuhi protokol kesehatan. Masyarakat yang mendapatkan bantuanini tidak boleh mendapatkan bantuan ganda, bantuannya satu kali saja khusus bantuan BST ini saja. Dalam penyalurannya BST ini sudah diambil alih oleh kantor pos. jadi kita tinggal memantau masyarakat dalam menerima bantuan ini, karena sempat ada yang mengalami kendala jadi kita yang cepat memberitahukan langsung ke pihak kantor pos, agar dapat di layani dengan cepat. Surat pengantar yang diberikan keluarga penerima itu surat yang berisi barcode, nanti itu pada saat pengambilan bantuan keluarga yang menerima wajib membawa KTP asli, KK asli dan surat pengantar yang sudah diberikan. Selanjutnya syarat-syarat tersebut digunakan unruk membantu dalam

⁴² Hamzah L, S.An, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Wawancara, Kecamatan Tana Lili Luwu Utara 12 Mei 2023.

verifikasi”.⁴³

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa penyaluran program BST di Kecamatan Tana Lili sudah berjalan dengan baik, dalam arti proses tahap penyalurannya sudah sesuai dengan kriteria penerima program Bansos yang telah ditentukan seperti, (1) Calon penerima adalah masyarakat yang masuk dalam pendataan RT/RW dan berada di desa, (2) Calon penerima adalah masyarakat yang kehilangan mata pencarian (3) Calon penerima tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) lain dari pemerintah pusat, (4) Jika calon penerima tidak mendapatkan bansos dari program lain, tetapi belum terdaftar oleh RT/RW, maka bisa langsung menginformasikannya ke aparat desa, dan (5) Calon penerima termasuk yang memenuhi syarat untuk menerima bantuan sosial tunai.⁴⁴Bansos ini yaitu untuk menjaga daya beli masyarakat. Program ini berlangsung selama beberapa tahapan dan diperuntukkan untuk masyarakat.

“ Menurut Pak Hamzah L, S.An sebagai Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan dalam wawancaranya. Ya, sudah tepat sasaran dan sesuai dengan kriteria yang ada, karena nama-nama yang keluar murni sesuai dengan syarat-syarat yang diminta.Jadi kita tidak tau bagaimana proses penyaringannya, kita Cuma kasih data selebihnya pusat yang menentukan para calon penerima bantuan sosial tersebut”.⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa dalam penentuan penerima sasaran program bansos di Kecamatan Tana Lili ini dipilih berdasarkan kriteria yang telah ada. Mengenai ketetapan sasaran program bansos di Kecamatan Tana Lili hal serupa juga dikemukakan oleh ibu Herni, S.Ag. SE sebagai

⁴³ Herni, S.Ag. SE, Sekretaris, Wawancara, Kecamatan Tana Lili, 12 Mei 2023

⁴⁴ Siti Nur Aeni, “Cara Daftar Bansos dan Syarat untuk Mendapatkannya”,

⁴⁵ Hamzah L, S.An, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Wawancara, Kecamatan Tana Lili 12 Mei 2023

sekretaris dalam bahwa,

” Kalau soal itu, ya sudah tepat sasaran karena sudah sesuai dengan kriteria. Sebagian besar juga pengajuan itu dapat terealisasi, Cuma tidak semua yang dapat. Kan itu bantuan macam-macam ada dari dana desa, ada dari kemensos dan ada juga dari provinsi. Kalau masalah bantuan bansos ini sudah sesuai karna kita diminta untuk mengajukan nama-nama yang sudah sesuai dengan syarat-syarat yang diminta”.⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program bansos di Kecamatan Tana Lili sudah tepat sasaran dalam artian sudah diberikan kepada penerima bantuan yang sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Kementerian Sosial. Dimana dalam pengertian ketetapan sasaran yaitu untuk mencapai sasaran/target yang ingin di capai dalam pelaksanaan sebuah program

2. Dampak Program Bantuan Sosial dalam mengatasi kemiskinan di Kecamatan Tana Lili

Sejak adanya Program bansos masyarakat dapat merasakan dampak dengan adanya bantuan sosial ini. Mereka merasa sangat terbantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Peneliti telah melakukan wawancara dengan beberapa informan bagaimana dampak BST tersebut di masa Pandemi.

” Menurut ibu Rosnaeni selaku penerima Bansos di Kecamatan Tana Lili dalam wawancaranya. Sejak adanya bantuan Sosial ini di masa pandemi sangat membantu, karena untuk anak sekolah saya, jadi setiap sudah terima langsung dipakai untuk membayar uang sekolah karena anak saya kan sekolah di pasantren setiap bulannya itu harus bayar uang sekolah. Jadi setiap sudah menerima bantuan Sosial ini langsung untuk keperluan anak sekolah. Dan alhamdulillah pemerintah sudah berperan aktif karena na bantu sekali ki ini bantuan bst selama pandemi. Bersyukur ki juga sudah na adakan ini program

⁴⁶ Herni, S.Ag. SE, Sekretaris, Wawancara, Kecamatan Tana Lili, 12 Mei 2023

bantuan.”⁴⁷

Hal yang sama juga di sampaikan oleh ibu Wiwi selaku penerima PKH di Kecamatan Tana Lili bahwa dengan adanya bantuan PKH ini bisa membantu sedikit perekonomian terutama kebutuhan pokok dalam sehari-hari.

“ Sejak saya terima ini uang bantuan PKH ekonomi keluargaku sedikit terbantu terutama dalam kebutuhan sehari-hari. Karena setiap pulang terima uang bantuan ini, saya langsung kepasar untuk membelanjakan uang bantuan tersebut seperti membeli beras 1 karung, dan bumbu-bumbu dapur yang kurang. Kadang juga dipergunakan untuk keperluan lain yang mendadak. Selama juga ada ini bantuan menurutku itu pemerintah sudah berperan aktif karena na bantu walaupun tidak cukup untuk satu bulan tapi setidaknya na bantu-bantuki sedikit untuk kebutuhan dirumah”⁴⁸

Mengenai dampak bantuan sosial PKH hal serupa juga dikemukakan oleh ibu Musdiani selaku penerima bantuan PKH bahwa.

“ Dengan adanya ini bantuan PKH sangat membantu keuangan,dan itu pemerintah sudah berperan membantu itu masyarakat, contohnya itu adami di pakai untuk membeli makanan pokok,seperti membeli beras,gula, dan langsung dibelanjakan habis untuk makanan saja. Dampak yang dirasakan itu menguntungkan dan sangat membantu karena kalau bantuannya keluar, ada lagi yang kita tunggu dari pemerintah”.⁴⁹

Sedangkan menurut ibu Jawida sebagai penerima BLT dalam wawancaranya,

“ Alhamdulillah terasa terbantu untuk membeli bahan pokok. Karena selama ada ini bantuan dimasa pandemi saya juga bisa menambah modal. Kalau tidak dipake untuk modal tidak cukup juga. Jadi dari modal bisa dapatuntung dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari.Ya pokoknya bersyukurki karna ada ini bantuan na keluarkan pemerintah”.⁵⁰

⁴⁷ Rosnaeni, Penerima Bantuan Sosial PKH, Wawancara, Kecamatan Tana Lili , 12 Mei 2023

⁴⁸ Wiwi, Penerima Bantuan Sosial PKH, Wawancara, Kecamatan Tana Lili , 12 Mei 2023

⁴⁹Musdiani, Penerima Bantuan PKH, Wawancara, Kecamatan Tana Lili, 12 Mei 2023

⁵⁰ awida, Penerima Bantuan Langsung Tunai Wawancara, Kecamatan Tana Lili, 12 Mei 2023

Sedangkan menurut bapak Undu mappe sebagai penerima BLT dalam wawancaranya,

“ Sejak adanya ini bantuan terbantu sedikit, karena kalau saya pulang menerima langsung saya belikan obat sesak nafas kasyan, karena harga obatku 150 ribu satu bulan, selain itu rutin ka juga pergi suntik setiap minggu. Alhamdulillah selama ada ini bantuan, bisami juga di pakai untuk beli beras selama sebulan”.⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya Program Bantuan Sosial sudah dapat membantu dan berdampak positif bagi kesejahteraan keluarga yang menerima bantuan tersebut. Dimana para penerima bantuan sudah merasa sedikit terbantu dengan adanya bantuan sosial yang mereka terima selama masa pandemi covid-19 ini.

C. Pembahasan

1. Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara

Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis pengelolaan dana BANSOS dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Tana Lili. Mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian pergerakan, dan pengawasan pada pengelolaan BANSOS itu sendiri. Pada penelitian ini penulis melibatkan narasumber dari pihak Dinas Sosial dan aparat desa maupun sebagai narasumber penelitian melalui observasi wawancara langsung. Menurut Kementerian Sosial bantuan sosial merupakan sebuah bantuan yang memiliki sifat sementara yang diberikan kepada masyarakat dengan keadaan ekonomi rendah agar bisa meningkatkan kehidupannya secara wajar.

⁷⁴Undu Mappe, Penerima Bantuan Langsung Tunai, Wawancara, Kecamatan Tana Lili, 12 Mei 2023

Pada teori pengelolaan menurut George R. Terry yang menjelaskan bahwa pengelolaan yang baik meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Teori ini digunakan untuk mengetahui pengelolaan dana BANSOS di Kecamatan Tana Lili . Hal tersebut sejalan dengan data yang diperoleh bahwa Pihak Dinas Sosial memiliki fokus pada program yang bernama “Program Bantuan Sosial Tunai” atau BST dengan perolehan data yang mengacu kepada indikator pengelolaan dana bantuan sosial yang meliputi Perencanaan, Pengorganisasian, Penggerakan, Pengawasan, Efektivitas, Sosialisasi Program dan Kesejahteraan Sosial.

Pengelolaan dana BANSOS di Kecamatan Tana Lili antara lain:⁵²

- a. Dilihat dari teori kesejahteraan sosial menurut Segal dan Brzuzy yang dikutip dalam Suud (2006:5) Kesejahteraan sosial adalah kondisi sejahtera dari suatu masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pendapat masyarakat Kecamatan Tana Lili bervariasi mulai dari masyarakat miskin di perkotaan dan yang berpenghasilan berkecukupan. Jika dirata-rata, untuk yang berpenghasilan sehari, masyarakat Kecamatan Tana Lili berpenghasilan 50.000 atau 1.500.000 untuk perbulan, selain itu ada beberapa masyarakat yang menjadi korban PHK dan masyarakat lansia. Untuk data yang lebih akurat, dalam DTKS terdata ada 473.000 masyarakat meliputi gelandangan dan minoritas, kategori miskin, dan potensi kesejahteraan sosial misalnya seperti volunteer dan lain-lain. Kemudian, kondisi kesehatan masyarakat Kecamatan Tana Lili dengan rata-rata kesehatan cukup baik.

⁵² Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Pasal 24 Tahun 2011, tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

- b. Perencanaan Pengelolaan BANSOS Kecamatan Tana Lili , yang mana rencana bantuan sosial tunai ini dilaksanakan dengan memberikan bantuan secara tunai yang disesuaikan dengan danom (data penerima manfaat), kepada masyarakat yang sudah ataupun belum terdaftar dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
- c. Pengorganisasian pengelolaan BANSOS Kecamatan Tana Lili, berkaitan dengan program Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara yaitu Program Bantuan Sosial Tunai dimana penyaluran dana bantuan sosial tunai ini masyarakat yang terdaftar sebagai KPM pencairan dana dapat dilakukan selama 3 tahap dengan nominal Rp. 500.000/tahap.
- d. Penggerakan Program Bantuan Sosial Tunai oleh Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara, yang mana dalam penyaluran bantuan sosial ini terdapat dua bidang yakni bidang perlindungan dan jaminan sosial serta bidang pengendalian data dengan tugas rapat koordinasi dari kepala dinas sosial dan kepala bidang penyaluran dana bantuan sosial untuk memonitoring dalam penyebaran dan penyaluran dana bantuan sosial ini.
- e. Pengawasan Program Bantuan Sosial Tunai oleh Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara, yang mana melakukan monitoring yang dilakukan bidang perlindungan dan jaminan sosial serta bidang pengendalian data terhadap sasaran yang diterapkan oleh dinas sosial kepada masyarakat penerima bantuan sosial diantaranya belum masuk data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) seperti masyarakat dalam sektor pendapatan informal dan yang terkena PHK.

f. Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai dari Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara, dilihat dari teori efektivitas, menurut Mardiasmo Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Adapun menurut Budiani menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel yang meliputi tujuan program, ketepatan sasaran program, sosialisasi program, dan pemantauan program.

Pencairan dana tahap pertama di seluruh Indonesia salah satunya Kecamatan Tana Lili dibagi pada bulan April 2020 secara serentak. Penyaluran dana kepada penerima bantuan dilakukan oleh kantor pos yang bertempat di masing-masing Kelurahan. Pemerintah menyalurkan dana bantuan sosial di seluruh wilayah Indonesia, melalui kerja sama dengan PT. Pos Indonesia (Persero) dan Himbara dengan alasan jaringan dan sumber daya yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia salah satunya untuk mengakselerasi penyaluran bantuan sosial.

Secara garis besar, dalam pelaksanaan penyaluran program BST dikelurahan Rampoang sudah berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial mengenai pemenuhan kebutuhan dasar Bantuan Sosial Tunai (BST) sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Herni, S.Ag. SE dalam wawancaranya menerangkan bahwa proses penyaluran bantuan sosial di kelurahan rampoang sudah berjalan dengan baik sesuai dengan yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial, dan sudah mematuhi protokol kesehatan. Pada saat pengambilan bantuan keluarga yang menerima wajib membawa KTP asli, KK asli

serta surat pengantar yang sudah diberikan. Selanjutnya syarat-syarat tersebut digunakan untuk membantu dalam verifikasi penerimaan bantuan sosial.

2. Dampak Program Bantuan Sosial dalam mengatasi kemiskinan di Kecamatan Tana Lili

Pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial tidaklah mudah, berbagai tahap demi tahap yang dilakukan pengurus pelaksana penyaluran bansos, karena program bansos ini adalah berupa uang tunai yang diberikan masyarakat sesuai dengan kriteria senilai 600.000/KK dan 300.000/KK. Untuk memperoleh bantuan ini, masyarakat perlu melalui sebuah proses verifikasi dan validasi data. Proses ini dapat dikatakan bersifat Nasional, karena harus melalui dari pihak RT sampai dengan penetapan sasaran oleh Kementerian Sosial, sehingga berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data.

Pemerintah sendiri telah menggelontorkan berbagai skema untuk membantu masyarakat. Banyak program inovatif yang telah disiapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah untuk memberikan solusi atas permasalahan mendasar yang dihadapi masyarakat Indonesia adalah kesejahteraan sosial, sehingga pemerintah hadir dengan berbagai program yang mencoba menyentuh langsung kepada masyarakat sebagai jawaban atas permasalahan mendasar tersebut. Keseriusan pemerintah ini bisa kita lihat dari lahirnya begitu banyak program yang secara khusus dikeluarkan untuk mengatasi masalah sosial.⁵³ Salah satu program Jaring Pengaman Sosial yaitu Bantuan Sosial Tunai (BST) dengan memberikan bantuan berupa uang tunai kepada masyarakat kelurahan rampoang yang berpenghasilan rendah dan terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat serta menjaga daya belinya ini dan meringankan beban

⁵³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Pasal 24 Tahun 2011, tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari- sehari di masa pandemi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penerima BST, bahwa dengan adanya program bantuan sosial tunai ini memberikan dampak nyata bagi penerima yang merasa terbantu setelah menerima bantuan ini, terlebih bagi masyarakat yang merasakan dampak seperti terjadinya penurunan pendapatan atau bahkan kehilangan mata pencaharian tentu adanya program bantuan ini sedikit meringankan beban mereka dalam memenuhi keperluan hidup. Kemudian adanya harapan yang besar dari warga penerima bantuan akan keberlanjutan dari program bantuan sosial tunai (BST) ini begitu diharapkan karena bantuan ini memang terbukti memberikan manfaat bagi penerimanya, walaupun nominal yang diberikan tidak mampu digunakan untuk mencukupi kebutuhan selama satu bulan penuh, namun adanya bantuan ini paling tidak mampu meringankan beban masyarakat penerima program BST.

Jika dikaitkan dengan teori Kesejahteraan (*Friedlander*), pada masa pandemi ini bahwa dapat membantu individu-individu dan kelompok-kelompok guna mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, hal tersebut termasuk dalam bentuk perlindungan sosial. Selain itu jika kita tinjau, pengadaan juga tertera pada pasal 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial mengenai perlindungan sosial yakni : ⁵⁴(1) perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal,

⁵⁴ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial mengenai perlindungan sosial

(2) perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan melalui, (a) Bantuan sosial, (b) Advokasi sosial, dan (c) Bantuan hukum.

Asumsi ini membuktikan bahwa pemberian Bantuan Sosial Tunai (BST) benar-benar telah memberikan perlindungan sosial terhadap kelangsungan hidup masyarakat Kelurahan Rampoang dan ditujukan untuk meringankan beban bagi masyarakat yang mengalami kehilangan mata pencaharian dan penurunan pendapatan di masa pandemi covid-19. Selain itu, di Kelurahan Rampoang, masyarakat yang menerima bantuan BST mempergunakan bantuan tersebut dalam kebutuhan sekolah atau pendidikan anaknya serta membantu dalam pengobatan atau kesehatan. Hal ini juga sesuai dengan salah satu tujuan dalam pemberian bantuan sosial bagi masyarakat yakni, memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat.

Adapun dampak yang dirasakan peneriman bantuan BST, antara lain :

- a. Terbantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- b. Meringankan biaya pendidikan.
- c. Membantu dalam kesehatan.

Dengan demikian, program Bansos dapat membantu penerima untuk meringankan biaya hidup dalam sehari-hari. ⁵⁵Kemampuan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan pokok berdasarkan standar harga tertentu adalah rendah sehingga kurang menjamin komputer standar kualitas hidup pada umumnya. Berdasarkan pengertian ini, maka kemiskinan secara umum didefinisikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya yang dapat menjamin komputer standar kualitas hidup.

⁵⁵ Mudrajat Kuncoro, *Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomika Pembangunan*, (Erlangga 2010)

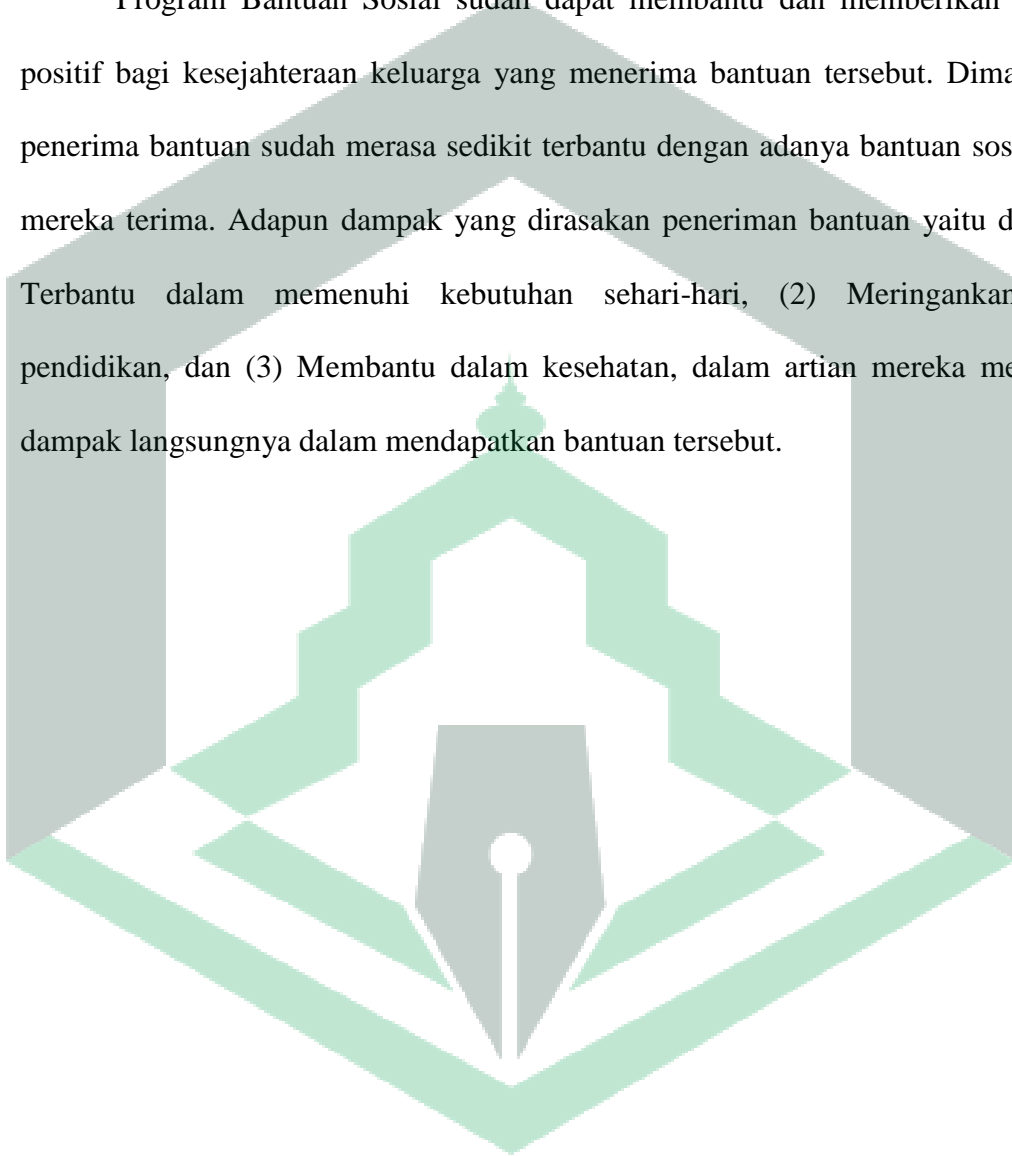
Pada umumnya, rendahnya kemampuan pendapatan akan berdampak pada kekuatan sosial (*social power*) dari seseorang atau sekelompok orang terutama dalam memperoleh keadilan ataupun persamaan hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kerentanan menghadapi situasi darurat (*State of emergency*). Seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin tidak memiliki atau kemampuan untuk menghadapi situasi yang tidak terduga di mana situasi ini membutuhkan alokasi pendapatan untuk menyelesaikannya. Misalnya, situasi rentan berupa bencana alam, kondisi kesehatan yang membutuhkan biaya pengobatan yang relatif mahal, dan situasi-situasi darurat lainnya yang membutuhkan kemampuan pendapatan yang dapat mencukupinya. Kondisi dalam kemiskinan dianggap tidak mampu untuk menghadapi situasi ini

Keterbatasan kemampuan pendapatan ataupun kekuatan sosial dari seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin tadi menyebabkan tingkat ketergantungan terhadap pihak lain adalah sangat tinggi. Mereka tidak memiliki kemampuan atau kekuatan untuk menciptakan solusi atau penyelesaian masalah terutama yang berkaitan dengan penciptaan pendapatan baru. Bantuan pihak lain sangat diperlukan untuk mengatasi persoalan-persoalan terutama yang berkaitan dengan kebutuhan akan sumber pendapatan.

Kelompok kebijakan penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial terpadu berbasis keluarga. Tujuannya adalah mengurangi beban rumah tangga miskin melalui peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih, dan sanitasi. Mekanisme pelaksanaan program bersifat langsung dan klasifikasi program ini meliputi program Program Keluarga Harapan (PKH),

Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Bantuan Siswa Miskin (BSM), Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN).

Program Bantuan Sosial sudah dapat membantu dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan keluarga yang menerima bantuan tersebut. Dimana para penerima bantuan sudah merasa sedikit terbantu dengan adanya bantuan sosial yang mereka terima. Adapun dampak yang dirasakan peneriman bantuan yaitu dapat (1) Terbantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, (2) Meringankan biaya pendidikan, dan (3) Membantu dalam kesehatan, dalam artian mereka merasakan dampak langsungnya dalam mendapatkan bantuan tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

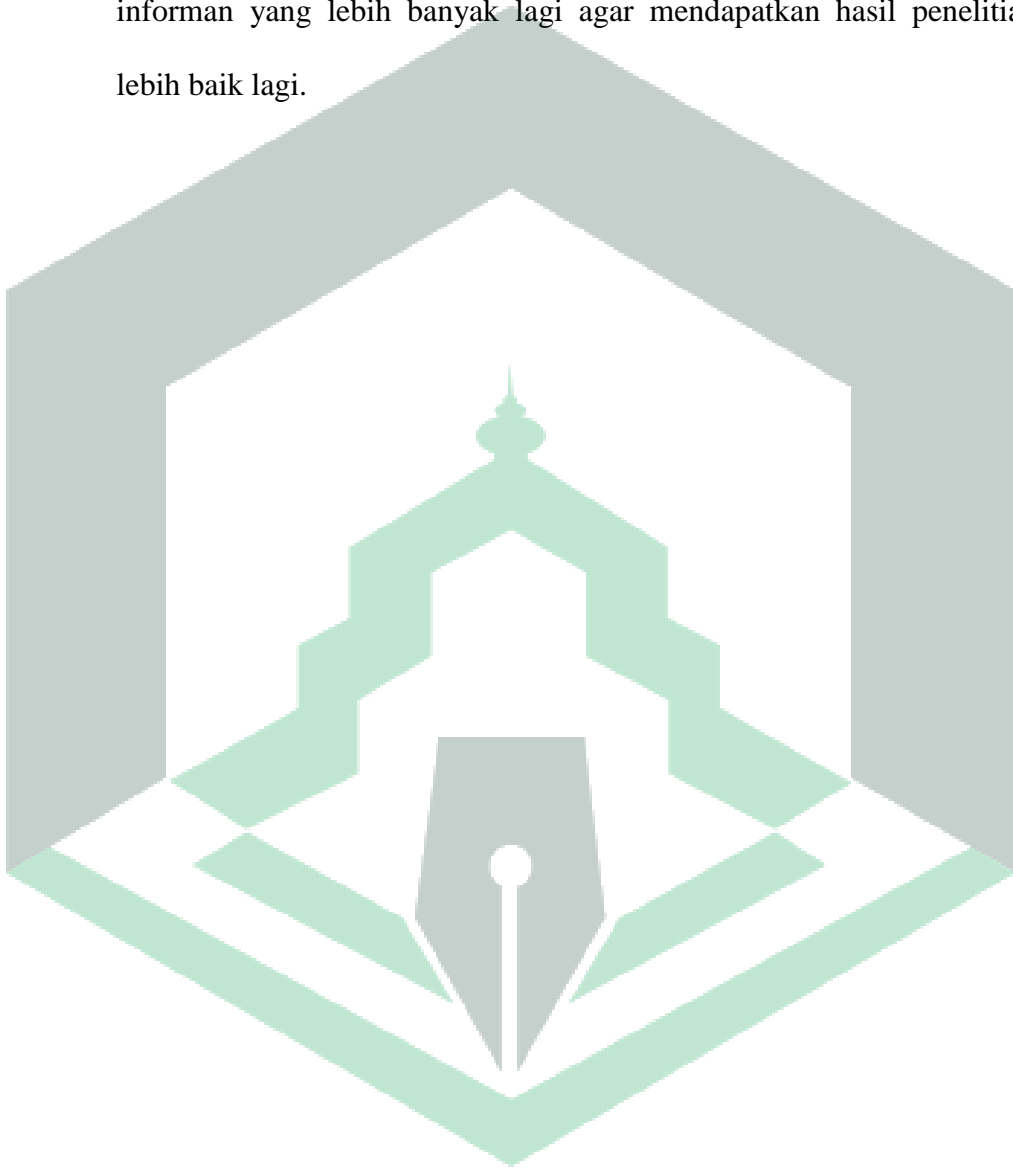
1. Penyaluran program bansos di Kecamatan Tana Lili sudah berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial mengenai pemenuhan kebutuhan dasar Bantuan Sosial tahap pelaksanaan penyaluran bantuan sosial BST di kelurahan rampoang telah disalurkan dalam beberapa tahapan. Penetapan bagi penerima sudah memenuhi kriteria komponen Bansos.
2. Program Bantuan Sosial Tunai (BST) sudah dapat membantu dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan keluarga yang menerima bantuan tersebut. Dimana para penerima bantuan sudah merasa sedikit terbantu dengan adanya bantuan sosial yang mereka terima. Adapun dampak yang dirasakan peneriman bantuan BST yaitu dapat (1) Terbantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, (2) Meringankan biaya pendidikan, dan (3) Membantu dalam kesehatan, dalam artian mereka merasakan dampak langsungnya dalam mendapatkan bantuan BST tersebut.

B. Saran

1. Kepada pihak Kelurahan Rampoang dan Dinas Sosial agar lebih fokus dan teliti dalam menentukan calon-calon yang berhak dan layak menerima bantuan dari pemerintah sendiri.
2. Diharapkan kepada penerima dana Program BST bisa dimanfaatkan dan di manajemen dengan baik, mengingat pandemi Covid-19 memberikan dampak

yang negatif terhadap aspek kesehatan terutama pada aspek perekonomian.

3. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar dapat meneliti lebih dalam lagi mengenai dampak program bantuan sosial tunai dan dapat mewawancarai informan yang lebih banyak lagi agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik lagi.



DAFTAR PUSTAKA

- Abed dan Gupta, *Governance, Corruption & Economic Performance* 2002
- Abidin, dkk 2013
- awida, Penerima Bantuan Langsung Tunai Wawancara, Kecamatan Tana Lili, 12 Mei 2023
- Badan Pusat Statistik (BPS) Luwu Utara
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 280
- Erni Tisnawati Sule, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2005
- Habibov, Nazim dan Fan, *Sosial Assistance And The Challenges Of Poverty And Inequality In Azerjaiban, A Low-Income Country In Transition* 2006
- Hamzah L, S.An, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Wawancara, Kecamatan Tana Lili Luwu Utara 12 Mei 2023.
- Hamzah L, S.An, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Wawancara, Kecamatan Tana Lili 12 Mei 2023
- Herni, S.Ag. SE, Sekretaris, Wawancara, Kecamatan Tana Lili, 12 Mei 2023
- Herni, S.Ag. SE, Sekretaris, Wawancara, Kecamatan Tana Lili, 12 Mei 2023
- [Http://www.PraktikManajemenSyariah](http://www.PraktikManajemenSyariah), diakses 7 Juli 2022
- Inpres Nomor 7 Tahun 2014
- Irhami, *Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan* 2017
- Kementrian Bidang Kesejahteraan (Kesra) tahun 2004
- Kongginawan, Skripsi 2016
- Mardikanto, *Penyuluhan Pembangunan Kehutanan*, 1993
- Melati dan Zulkarnaini, “ Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Pasir Pangaraian”, *Jurnal Publicuho*, Vol.4 no.1 (2021): [23.http://ojs.uho.ac.id/index.php/PUBLICUHO/article/view/16021](http://ojs.uho.ac.id/index.php/PUBLICUHO/article/view/16021).
- Mujamil Qomar, *Manajemen Islam*, (jakarta: Erlangga, 2005)

Musdiani, Penerima Bantuan PKH, Wawancara, Kecamatan Tana Lili, 12 Mei 2023

Nurcahya 2020

Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Pasal 24 Tahun 2011, tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Pasal 25 Tahun 2011, tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2012

Peraturan menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2016

Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial

Perpres No. 15 Tahun 2010

Perpres No. 9 Tahun 2015, tentang Kemenko PMK

Purwanto, Penguatan Kelompok Tani dalam Mendukung Pembangunan Pertanian di Jawa Timur, 2007

Rosnaeni, Penerima Bantuan Sosial PKH, Wawancara, Kecamatan Tana Lili, 12 Mei 2023

Saputro, Implementasi Program Beras Untuk Masyarakat Miskin (Raskin) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan, 2015.

Siswanto, Pengantar Manajemen, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005

Siti Nur Aeni, "Cara Daftar Bansos dan Syarat untuk Mendapatkannya",

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2011) 62.

Suryawati, 2004

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 24 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undu Mappe, Penerima Bantuan Langsung Tunai, Wawancara, Kecamatan

Tana Lili, 12 Mei 2023

Widiarto & Surya, Efektivitas Program Beras Miskin (Raskin) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan, 2018.

Wikipedia, 2022 diakses 7 Juli 2022

Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis Ekonomi*, (yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), 270

Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis Ekonomi*, (yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), 273-275.

Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis Ekonomi*, (yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), 270-271.

Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis Ekonomi*, (yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), 276.

Wiwi, Penerima Bantuan Sosial PKH, Wawancara, Kecamatan Tana Lili , 12 Mei 2023

World Bank, a new era in poverty eradication, 2017

